

**ANALISIS *FRAMING* PEMBERITAAN MEDIA *ONLINE* MENGENAI  
BERITA RANCANGAN UNDANG-UNDANG HALUAN IDEOLOGI  
PANCASILA DI MEDIA KOMPAS.COM DAN REPUBLIK *ONLINE***



**IAIN PURWOKERTO**

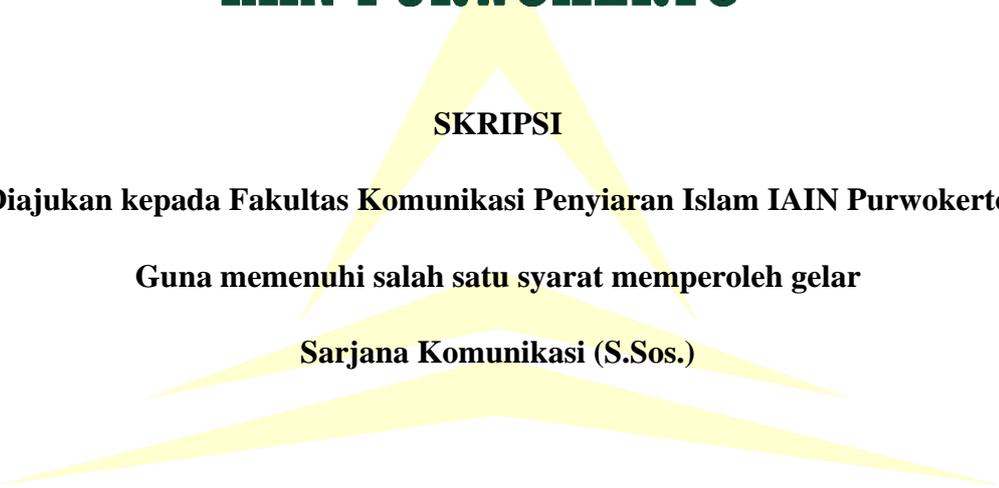
**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Komunikasi Penyiaran Islam IAIN Purwokerto**

**Guna memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar**

**Sarjana Komunikasi (S.Sos.)**

Oleh



**IAIN PURWOKERTO**

**TAHRIFUDIN**

**NIM:1323102026**

**JURUSAN KOMUNIKASI PENYIARAN ISLAM**

**FAKULTAS DAKWAH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO**

**2021**

## Pernyataan Keaslian

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Tahrifudin

Nim : 1323102026

Jenjang : S1

Jurusan : Komunikasi Penyiaran Islam

Program Studi : Penyiaran Islam

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi yang berjudul **Analisis Framing Pemberitaan Media Online Mengenai Berita Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila Di Media Kompas.Com Dan Republik Online** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam bentuk daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 9 Februari 2021

Yang menyatakan



Tahrifudin  
Nim.1323102026

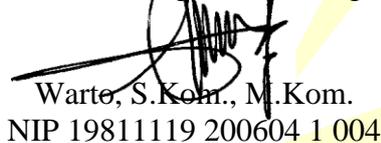
**PENGESAHAN**

Skripsi Berjudul:

**ANALISIS FRAMING PEMBERITAAN MEDIA ONLINE MENGENAI  
BERITA RANCANGAN UNDANG-UNDANG HALUAN IDEOLOGI  
PANCASILA DI MEDIA KOMPAS.COM DAN REPUBLIK ONLINE**

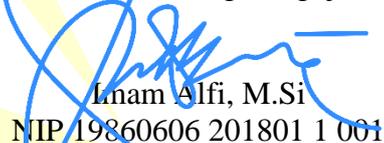
yang disusun oleh Saudara: **Tahrifudin**, NIM. **1323102026**, Program Studi **Komunikasi dan Penyiaran Islam** Jurusan **Penyiaran Islam**, Fakultas Dakwah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, telah diujikan pada tanggal: **23 Januari 2021**, dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Sosial (S.Sos.)** pada sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Pembimbing,



Warte, S.Kom., M.Kom.  
NIP 19811119 200604 1 004

Sekretaris Sidang/Penguji II,



Inam Alfi, M.Si  
NIP 19860606 201801 1 001

Penguji Utama,

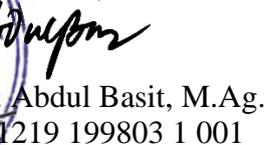


Uus Uswatusolihah, S.Ag, M.A.  
NIP 19770304 200312 2 001

Mengesahkan,

Tanggal 9-2-2021

Dekan,



Prof. Dr. H. Abdul Basit, M.Ag.  
NIP 19691219 199803 1 001



## Nota Dinas Pembimbing

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Dakwah

IAIN Purwokerto

Di Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi maka saya sampaikan naskah skripsi saudara:

Nama : Tahrifudin  
Nim : 1323102026  
Fakultas : Dakwah  
Jurusan : Komunikasi Penyiaran Islam  
Program Studi : Penyiaran Islam  
Judul Skripsi : **ANALISIS FRAMING PEMBERITAAN MEDIA ONLINE MENGENAI BERITA RANCANGAN UNDANG-UNDANG HALUAN IDIOLOGI PANCASILA DI MEDIA KOMPAS.COM DAN REPUBLIKA ONLINE**

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Dakwah IAIN Purwokerto untuk di ujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana dalam Komunikasi Penyiaran Islam (S.Sos).

Demikian atas perhatiannya, kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Purwokerto, 9 Februari 2020

Pembimbing



Wartyo, S.Kom., M.Kom.  
NIP 19811119 200604 1 004

**ANALISIS *FRAMING* PEMBERITAAN MEDIA *ONLINE* MENGENAI  
BERITA RANCANGAN UNDANG-UNDANG HALUAN IDEOLOGI  
PANCASILA DI MEDIA KOMPAS.COM DAN REPUBLIK *ONLINE***

TAHRIFUDIN

NIM.1323102026

**Abstak**

Undang-undang dasar 1945 merupakan seperangkat aturan yang dibuat untuk mengatur keteraturan dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Perubahan atau penambahan undang-undang juga akan berpengaruh pada tatanan hidup masyarakat. Di media massa saat ini banyak tersiar kabar tentang rancangan undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (HIP) yang mana dinilai bertentangan dengan ideologi Pancasila. Beberapa media masa memiliki gaya masing-masing dalam penulisan beritanya. Kompas.com dan Republika *online* merupakan media massa yang juga memberitakan berita tersebut. Dari berita yang diterbitkan Kompas.com dan Republika *online*, diketahui bahwasanya RUU HIP ditolak oleh masyarakat karena dinilai mengancam eksistensi Pancasila sebagai dasar negara.

Setiap media sesungguhnya memiliki ideologi yang berbeda mengingat media bukanlah saluran yang bebas tetapi mengkontruksi berita sedmikian rupa. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana media *online* yaitu kompas.com dan republika.co.id mengemas berita tentang Haluan Ideologi Pancasila. Model analisis *Framing* yang akan menggunakan teori Zhongdan Pan dan Gerald M. Kosicki. Perbedaan pembingkaiian berita yang dimunculkan oleh kompas.com dan repblika.co.id yang paling jelas terlihat adalah perbedaan narasumber. Reublika *Online* dipandang sebagai media yang bernuansakan islam selalu memilih narasumber yang berpemikiran islam.

**Kata kunci : Analisis *Framing*, RUU HIP, Media *Online***

## **MOTTO**

“Semua kebenaran mudah dimengerti setelah ditemukan; intinya adalah menemukan mereka.”

Galileo Galilei

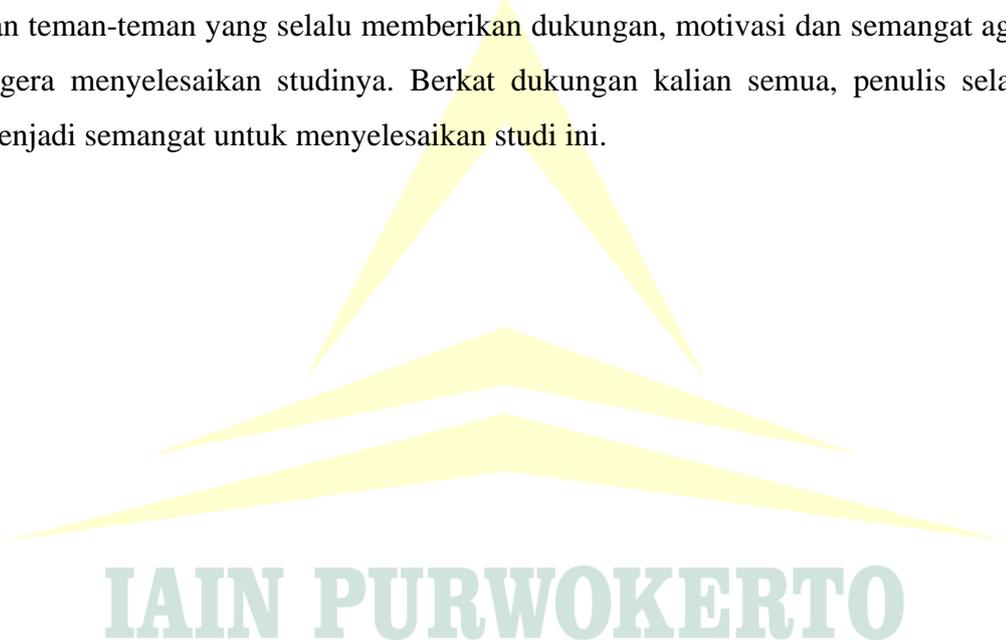


### **Halaman Persembahan**

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang selalu memberi petunjuk dan kemudahan dalam setiap langkah kebaikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Dengan hati yang tulus karya ini penulis persembahkan untuk:

Bapak Fathurrochman dan ibu Salmuni, yang penuh keikhlasan dan kasih sayangnya selalu memberikan perhatian, bimbingan, motivasi, dan senantiasa mendoakan penulis. Semoga Allah SWT senantiasa selalu diberikan kesehatan dan perlindungan-Nya. Aamiin.

Skripsi juga penulis persembahkan untuk adik-adik penulis, keluarga besar dan teman-teman yang selalu memberikan dukungan, motivasi dan semangat agar segera menyelesaikan studinya. Berkat dukungan kalian semua, penulis selalu menjadi semangat untuk menyelesaikan studi ini.



**IAIN PURWOKERTO**

## Kata Pengantar

*Alhamdulillahirobbil'alamin.* Puji syukur kehadiran Allah yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sosok teladan sepanjang zaman, beserta para sahabat dan pengikutnya, yang telah mengantarkan umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang dihiasi dengan ilmu seperti saat ini.

Berkenaan dengan selesainya skripsi yang berjudul “Analisis *Framing* Pemberitaan Media *Online* Mengenai Berita Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila Di Media Kompas.Com Dan Republik *Online*” yang tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, nasehat, dan motivasi kepada penulis dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag., selaku Rektor IAIN Purwokerto.
2. Prof. Dr. H. Abdul Basit, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Dakwah IAIN Purwokerto.
3. Uus Uswatusolihah, M.A., selaku Ketua Jurusan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah IAIN Purwokerto.
4. Dr. Sul Khan Chakim, S.Ag, M.M. Penasihat Akademik angkatan 2015 IAIN Purwokerto.
5. Warto, M.Kom., selaku pembimbing skripsi penulis, terimakasih atas segala arahan dan kesabarannya menuntun penulis menyelesaikan skripsi ini.
6. Segenap Dosen, Karyawan, dan seluruh civitas akademik IAIN Purwokerto yang telah membekali berbagai ilmu pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman selama menempuh studi di Fakultas Dakwah IAIN Purwokerto.
7. Keluarga besar, terutama orang tua saya Bapak Fathurrochman dan ibu Salmini, banyak terima kasih yang telah memberi dukungan moral maupun materiil untuk menyelesaikan skripsi.
8. Adik-adik tersayang penulis. Nurkhovaiq, Iftah Alvadilla, Annas Hidayat Nur Rohman yang selalu memberikan dorongan semangat moril, serta doa yang

selalu dipanjatkan. Semoga menjadi awal kesuksesan saya yang dapat membanggakan kalian.

9. Teman-teman seperjuangan KPI angkatan 2013 yang senantiasa memberikan semangat kepada penulis, semoga kita semua dapat terus menjalin silaturahmi.
10. Untuk orang terdekat dan sahabat-sahabat baikku Riski Arsyansah, Kirtam, Jamal, Jaka, Dwi, Vendi, Faizun, Aziz, Mufid, Ida Nurul Amanah, Selly terimakasih sudah menjadi sahabat sekaligus keluarga selama ini. Tanpa kalian masa-masa kuliah saya akan biasa-biasa saja, terimakasih untuk support yang luar biasa, sampai saya dapat menyelesaikan skripsi ini dan semoga tetap terjalin silaturahmi selamanya.
11. Saudara dan teman yang telah membantu mensupport dalam segala hal.
12. Ayu Aprianti, calon teman hidup yang tak bosan-bosannya memotivasi, memberi semangat dan dukungan yang menjadikan semangat menulis.
13. Semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan bantuan baik secara moril maupun materil sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Dalam skripsi ini, penulis mengakui banyak kekurangan di dalamnya, oleh sebab itu penulis mohon kritik dan sarannya sehingga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, Aamiin. Penulis juga menyampaikan rasa terima kasih dan berdoa, semoga amal baik dari semua pihak tercatat sebagai amal ibadah yang diridhoi Allah SWT, dan mendapat pahala, Aamiin.

Purwokerto, 9 Februari 2021

Penulis

Tahrifudin  
Nim.1323102026

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	II
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	III
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING</b> .....	IV
<b>ABSTRAK</b> .....	V
<b>MOTTO</b> .....	VI
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	VII
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	VIII
<b>DAFTAR ISI</b> .....	X
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	XIII
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	XIV
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	XV
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. LATARBELAKANG MASALAH.....	1
B. PENEGASAN ISTILAH.....	5
C. RUMUSAN MASALAH.....	7
D. TUJAN PENELITIAN.....	7
E. MANFAAT PENELITIAN.....	7
F. TINJAUAN PUSTAKA.....	8
G. METODE PENELITIAN.....	9
H. SISTEMATIKA PEMBAHASAN.....	12
<b>BAB II PEMBAHASAN</b> .....	<b>14</b>
A. PENGERTIAN PERS.....	14
B. KEBEBASAN PERS.....	15
C. PENGERTIAN MEDIA.....	17
D. IDIOLOGI MEDIA.....	18
E. MEDIA MASSA.....	20
F. FRAMING BERITA.....	22
1. Analisis Framing Murray Edelman.....	23
2. Analisis Framing William A. Gomson dan Modigliani.....	24

3. Analisis Framing Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki.....	25
4. Analisis Framing Robert N. Entman.....	31
5. Analisis Framing Tood Gitlin.....	32
6. Analisis Framing Amy Binder.....	32
<b>BAB III METODELOGI PENELITIAN.....</b>	<b>34</b>
A. JENIS DAN PENDEKATAN PENELITIAN.....	34
B. SBJEK DAN OBJEK PENELITIAN.....	35
C. TEHNIK PENGUMPULAN DATA.....	35
D. ANALISIS DATA.....	36
<b>BAB IV ANALISIS BERITA.....</b>	<b>37</b>
A. GAMBARAN UMUM MEDIA.....	37
1. MEDIA KOMPAS	
a. Sejarah Kompas.com.....	37
b. Visi dan Misi Kompas.com.....	38
c. Logo dan Tagline Kompas.com.....	39
d. Produk Kompas.com.....	41
e. Struktur Media Kompas.com.....	42
2. <i>Republika Online</i> .....	44
a. Sejarah <i>Republika Online</i> .....	44
b. Visi dan Misi <i>Republika Online</i> .....	45
c. Logo dan Tagline <i>Republika Online</i> .....	46
d. Produk <i>Republika Online</i> .....	46
e. Struktur Media <i>Republika Online</i> .....	47
B. FRAMING BERITA MODEL ZHONGDANG PAN DAN KOSICKI.....	48
1. Teks Berita.....	48
2. Temuan Data.....	50
3. Analisis dan Interpretasi.....	52
<b>BAB V KESIMPULAN.....</b>	<b>63</b>
A. KESIMPULAN.....	63

B. SARAN .....	64
C. PENUTUP .....	64

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**



## **Daftar Lampiran**

- Lampiran 1 Berita RUU HIP di Situs Kompas.Com
- Lampiran 2 Berita RUU HIP di Situs Republika.Com
- Lampiran 3 Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal
- Lampiran 4 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif
- Lampiran 5 Surat Keterangan Wakaf Perpustakaan
- Lampiran 6 Sertifikat BTA/PPI
- Lampiran 7 Sertifikat Pengembangan Bahasa Arab
- Lampiran 8 Sertifikat Pengembangan Bahasa Inggris
- Lampiran 9 Sertifikat Computer
- Lampiran 10 Sertifikat PPL
- Lampiran 11 Sertifikat KKN
- Lampiran 12 Daftar Riwayat Hidup



**IAIN PURWOKERTO**

## **Daftar Gambar**

- Gambar 1 Logo Kompas.Com : hal 41
- Gambar 2 Logo Republika.Co.id : hal 46
- Gambar 3.1 Teks Berita Kompas : hal 48
- Gambar 3.2 Teks Berita Kompas : hal 49
- Gambar 4.1 Teks Berita Republika : hal 49
- Gambar 4.2 Teks Berita Republika : hal 50
- Gambar 5 Berita Kompas.com Edisi Agustus 2020 : Lampiran
- Gambar 6 Berita Kompas.com Edisi Agustus 2020 : Lampiran
- Gambar 7 Berita Kompas.com Edisi Agustus 2020 : Lampiran
- Gambar 8 Berita Kompas.com Edisi Agustus 2020 : Lampiran
- Gambar 9 Berita Republika Edisi Agustus 2020 : Lampiran
- Gambar 10 Berita Republika Edisi Agustus 2020 : Lampiran



**IAIN PURWOKERTO**

## Daftar Tabel

<b>Nama Tabel</b>	<b>Halaman</b>
Tabel 1.0 Berita Edisi Agustus 2020	1
Teori 2.0 <i>Framing</i> Gomson dan Modigliani	25
Tabel 3.0 Teori <i>Framing</i> Pan and Kosicki	27
Tabel 4.0 Teori <i>Framing</i> Robert N. Entman	31
Tabel 5.0 Analisis Berita Kompas.com edisi 26 Agustus 2020	52
Tabel 6.0 Analisis Berita Republik.co.id edisi 26 Agustus 2020	56



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG MASALAH

Media massa dalam menyiarkan berita selalu melakukan pembingkaiian (*framing*) berita terhadap sebuah peristiwa atau isu yang ada di masyarakat.

Dengan melakukan *framing* berita, media atau politisi dapat menonjolkan sudut pandang tertentu dari sebuah peristiwa yang mana kemudian mengarahkan pembaca pada opini atau pemikiran tertentu.<sup>1</sup>

Media di Indonesia menggunakan *framing* untuk menyampaikan beritanya. Misalnya saja berita tentang Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila(HIP) pada agustus 2020 yang lalu. Berbagai media Indonesia menggunakan pola pembingkaiian dan kecenderungan mereka dalam menyajikan berita RUU HIP. Salah satu media yang memberitakan berita tersebut yaitu Kompas.com dan Republika *Online*. Berikut tanggal dan judul berita yang diberitakan Kompas.com dan Republika *Online* pda bulan agustus yang lalu:

**Tabel 1.0 Berita Edisi Agustus 2020**

Kompas.com	Republika <i>Online</i>	Tanggal Berita di muat
MUI: RUU HIP Bertentangan dan Mengancam Eksistensi Pancasila	MUI Ingatkan DPR Segera Cabut RUU HIP dari Prolegnas	26 Agustus 2020
	MUI: RUU HIP Makin Lama Digantung Makin Timbulkan Kegaduhan	25 Agustus 2020
Sekjen MUI: Yang Harus Dilakukan Pemerintah Bukan		19 Agustus 2020

<sup>1</sup> Cissel, Margaret. (2012) "*Media Framing: a Comparative Content Analysis on Mainstream and Alternative News Coverage of Occupy Wall Street*", The Elon Journal of Undergraduate Research in Communications, Vol. 3(No. 1), pp. 68

Bahas RUU Cipta Kerja atau HIP		
Fahri Hamzah Nilai RUU HIP Akan Digugat Jika Tetap Disahkan, ini Alasannya		18 Agustus 2020
Budiman Sdiatmiko Sebut PDI-P Bukan Konseptor RUU HIP		17 Agustus 2020

Terkait dengan munculnya RUU HIP, penulis mengutip informasi bahwasanya. Pada tanggal 12 Mei yang lalu, DPR RI telah meresmika RUU HIP sebagai inisiatif DPR. RUU yang dibuat dikirim untuk mendapatkan persetujuan Presiden Joko Widodo untuk pembahasan selanjutnya. Peresmian ini banyak menuai protes dari berbagai pihak salah satunya adalah Majelis ulama Indonesia(MUI), GP Ansor, hingga para purnawirawan. Tudingan mereka terhadap peraturan ini beragam, mulai dari spekulatif seperti pembangkitan komunisme, hingga dianggap terlalu sekuler atau bahkan tidak ada urgensinya sama sekali.<sup>2</sup>

Dengan adanya berbagai penolakan yang dilakukan masnyakat, pemerintah beralasan tidak dapat langsung melakukan pencabutan RUU HIP dari Prolegnas. Hal ini disampaikan oleh supratman (Ketua Badan Legislasi(BALEG) DPR), adanya peraturan yang mengatur DPR sehingga tidak langsung dapat melakukan penarikan RUU dari Prolegnas prioritas 2020. Supratman juga menyampaikan, bahwasanya “RUU Haluan Ideologi Pancasila tidak bisa serta merta dicabut dalam prolegnas prioritas tahun 2020, karena surat dan naskah akademik sudah dikirimkan DPR kepada pemerintah.” Oleh sebab itu penarikan RUU HIP yang telah dimasukan dalam prolegnas harus diputuskan sesuai prosedur yaitu melalui tingkat Badan Musyawarah (Bamus).<sup>3</sup>

<sup>2</sup> Prabowo, haris. *Berita Siapa penggerak RUU HIP yang ditentang banyak pihak? Kenapa pula itu tak penting?* Di tirto.id, di akses pada tanggal 24 november 2020

<sup>3</sup> Mashabi, Sania. *Berita Berjudul MUI: RUU HIP Bertentangan dan Mengancam Eksistensi Pancasila*, kompas.com yang di akses pada 7 oktober 2020

Dengan adanya berita di atas maka dapat disimpulkan bahwasana RUU HIP banyak menuai penolakan dari masyarakat namun demikian pemerintah tidak dapat semena mena mencabutnya karena sudah masuk dalam prolegnas. Pembingkai berita ini menarik untuk dibahas, selain menjadi salah satu trending topik pada bulan juli yang lalu dan menjadi berita yang banyak di cari melalui mesin pencarian *Google*, isi berita ini berkaitan dengan ideologi bangsa Indonesia. Tak sedikit pula media yang memuat berita tentang RUU Haluan Ideologi Pancasila salah satunya yaitu Kompas.com dan Republika *Online*. Kedua media ini telah menerbitkan berita yang sama yaitu tentang RUU HIP namun dengan sudut pandang yang berbeda.

Latar belakang seorang wartawan dari media yang bersangkutan dapat menjadi pengaruh terhadap penyampaian suatu berita di berbagai media. Bagi masyarakat, biasanya pesan dari suatu berita akan dinilai apa adanya. Tetapi, bagi kalangan tertentu yang paham betul gerak pers akan menilai berbeda terhadap berita tersebut. Mereka menilai bahwa setiap berita menyimpan ideologi dan campuran tangan dari wartawan. Seorang wartawan pasti akan menuangkan ide mereka dalam analisisnya terhadap data yang diperolehnya di lapangan. Setiap media akan memberitakan sesuai dengan sudut pandang wartawan yang mengikuti alur dari kegiatan narasumber tersebut.<sup>4</sup> Berita yang ditulis wartawan tentunya memiliki sudut pandang yang berbeda, hal ini dimaksudkan untuk membentuk sebuah *public opinion* yang sesuai dengan ideologi media.

*Menurut Walter Lippmann, dalam bukunya yang berjudul Public Opinion, mengatakan bahwa media memiliki peran mendefinisikan dunia. Dimana media memegang peranan sebagai mediator yang akan mempertemukan realitas dengan gambaran yang ada dalam pikiran.*<sup>5</sup>

Kompas.com dan Republika *online* merupakan media yang sudah berkembang cukup besar dan banyak diminati oleh masyarakat Indonesia. Dan memiliki minat baca tinggi mulai dari remaja sampai dewasa. Sehingga bukan tidak

---

<sup>4</sup> Citra Hayati Nainggolan. *Analisis Framing Pemberitaan Ganjar Pranowo Dalam Kasus Korupsi E-KTP* (Tribun News, Jawa Pos, dan Suara Merdeka Periode Agustus – November 2015 dan Maret 2017). Skripsi. (Semarang: Departemen Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Diponegoro, 2017)

<sup>5</sup> Umaimah Wahid, *Komunikasi Politik: Teori, Konsep, dan aplikasi pada Era Media Baru*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2018), hlm. 159

mungkin kedua media massa ini dapat mempengaruhi daya pikir pembacanya terhadap berita yang ada. Dalam skripsi ini, penulis berupaya menyoroti bagaimana kedua media ini mengemas suatu berita tentang Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (HIP). Hal ini cukup menarik mengingat tiap media memiliki sudut pandang yang berbeda terkait pemberitaan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila.

Media massa dalam mengkonstruksi dan mendekonstruksikan realitas terutama pada pemberitaan biasanya memberikan prioritas liputan mengenai peristiwa ataupun isu tertentu dan mengabaikan yang lain (agenda setting). Di samping itu, media juga memberikan penekanan pada substansi persoalan tertentu berkenaan dengan peristiwa dan isu tertentu dan juga mengabaikan substansi persoalan lain (*framing*). Dengan kedua cara ini media massa mengkonstruksi dan mendekonstruksi sebuah realitas.<sup>6</sup>

Menurut Peter Berger & Thomas Luckman, realitas sosial bukanlah sesuatu yang terjadi semata-mata, melainkan hasil interpretasi atau pemaknaan manusia. Karena merupakan hasil pemaknaan yang subjektif berdasarkan nilai-nilai individu, Realitas merupakan sesuatu yang dikonstruksi atau dibangun oleh individu.<sup>7</sup>

*Eriyanto menjelaskan bahwa : Konstruksionis memandang media sebagai agen konstruksi sosial karena media mengkonstruksi realitas dengan cara mendefinisikan realita tersebut pada khalayak berdasarkan konsepsi dan pandangan media tersebut. Media mengkonstruksi realita melalui proses seleksi realitas yang dianggap penting untuk diberitakan dan mengatur bagaimana realita tersebut ditampilkan dalam berita, yaitu dengan cara memilih narasumber, memilih bahasa yang dipakai, dan membingkai dalam sudut pandang tertentu.<sup>8</sup>*

---

<sup>6</sup> Pawito, *Komunikasi Politik: Media Massa dan Kampanye Pemilihan*, (Yogyakarta dan Bandung: Jalasutra, 2015), hlm. 104.

<sup>7</sup> Eriyanto, *Anlisis Framing: Komunikasi, Ideologi dan Politik Media*. (Yogyakarta: LKIS. 2012), hal 16-17

<sup>8</sup> Eriyanto, *Anlisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media*. (Yogyakarta: LKIS, 2002) hal 22

## B. PENEGASAN ISTILAH

### 1. Berita

Berita merupakan sarana penyampaian informasi tentang berbagai peristiwa aktual yang dapat menarik perhatian orang banyak. Peristiwa yang disajikan harus melibatkan fakta dan data harus dapat dibuktikan keberadaanya di dunia ini, peristiwa yang terjadi bersifat aktual dalam arti “baru saja” atau hangat dibicarakan orang banyak. Adapun cara penyampaiannya atau cara berita itu disampaikan, agar dapat menarik perhatian orang banyak, dan dapat diterima secara wajar, berita sering kali disampaikan dengan cara “to the point” atau “diplomatis”. Demikian seorang jurnalis atau wartawan dalam hal membuat dan menyajikan berita harus sesuai dengan kaidah jurnalistik.<sup>9</sup>

### 2. Media *Online*

Media *online* adalah media yang menggunakan basis telekomunikasi dan multimedia (komputer dan internet). Media *online* merupakan media yang menggunakan internet sebagai penghubungnya. Media yang termasuk dalam kategori media *online* diantaranya ialah: website (situs web termasuk blog dan media sosial seperti *isntagram*, *facebook* dan *twitter*), portal, radio *online*, TV *online*, email<sup>10</sup>

Secara umum media *online* dapat diartikan sebagai segala jenis atau format media yang hanya bisa diakses melalui internet. Media *online* juga sering disebut sebagai sarana komunikasi secara *online*. Secara khusus media *online* terkait dengan pengertian media dalam konteks komunikasi massa. Hal ini disebabkan karena penyebaran informasi bukan hanya dapat diterima satu orang saja, informasi dapat disebarkan baik secara public maupun personal. Dengan penyebaran informasi ke public inilah sehingga media *online* dapat masuk dalam konteks komunikasi massa. Kompas.com dan Republika *online*

---

<sup>9</sup> Kustadi Suhadang, *PengantarJurnalistik*. (Bandung: Nuansa, 2004). Hal. 103-104

<sup>10</sup> Asep Syamsul, M.Romli, *Jurnalistik Online: Panduan Praktis Mengelola Media Online* (Dilengkapi Kiat Blogger, Teknik SEO dan Tips Media Sosial), (Bandung: Penerbit Nuansa Cendekia, 2012), hlm. 31

merupakan situs berita dari media *online* yang menyajikan informasi-informasi terbaru dengan cepat dan mudah untuk diakses khalayak.<sup>11</sup>

### 3. Analisis *Framing*

Analisis *framing* merupakan teori analisis yang merupakan bagian dari pendekatan analisis wacana, analisis *framing* biasanya digunakan untuk menganalisis berita atau opini yang diterbitkan oleh media. *framing* pertama kali digagas oleh Beterson pada tahun 1955. Frame diartikan sebagai kerangka konseptual yang salah satu fungsinya dapat digunakan untuk mengorganisir masyarakat, serta menyediakan kategori-kategori yang standar untuk mengapresiasi realitas. Tahun 1974, Goffman mengembangkan *Framing* lebih dalam, yang mana menyebutkan *frame* sebagai kepingan-kepingan perilaku (*strips of behavior*) yang membimbing individu dalam membaca realitas.<sup>12</sup>

Dalam perspektif ilmu komunikasi, analisis *framing* sering digunakan untuk menganalisis cara-cara atau ideologi suatu media saat mengkonstruksi fakta yang ada dalam berita. Analisis *framing* juga dapat digunakan untuk mengamati strategi seleksi, penonjolan dan pertautan fakta ke dalam berita agar lebih bermakna, lebih menarik, lebih mudah untuk diingat sehingga menggiring opini public agar sesuai perspektifnya. Dengan kata lain, *framing* adalah pendekatan untuk mengetahui bagaimana perspektif atau sudut pandang yang digunakan oleh jurnalis atau wartawan ketika menyeleksi isu dan fakta saat menulis berita. Sudut pandang atau perspektif seorang wartawan menentukan fakta atau opini apa yang akan diambil, bagian-bagian mana saja yang ditonjolkan dalam berita dan bagian-bagian mana yang akan dihilangkan, serta hendak dibawa ke mana berita tersebut.<sup>13</sup>

Entman membedakan *framing* menjadi dua dimensi, yaitu: seleksi isu dan penekanan. Penekanan bisa berarti penonjolan fakta dan opini yang ada. Kedua faktor ini menjadikan *framing* berita lebih akurat. Terlebih dengan

<sup>11</sup> Asep Syamsul. Hlm31

<sup>12</sup> Alex Sobur, *Analisis Teks Media: Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik, dan Analisis Framing*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), hlm. 162

<sup>13</sup> Alex Sobur, *Analisis Teks Media*, hlm 162

adanya proses seleksi isu, fakta dan opini yang layak akan dipilih dan ditampilkan dalam teks berita dan di tonjolkan dalam isi beritanya. Perspektif wartawanlah akan menentukan fakta yang akan ditonjolkannya, dan fakta atau isu mana yang akan dibuang. Dengan adanya seleksi mengenai isu mana atau fakta dan opini mana yang ditonjolkan, wartawan akan dengan mudah menyusupkan nilai dan ideologi yang dimilikinya.<sup>14</sup>

### **C. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah *Framing* berita tentang rancangan undang-undang Haluan Ideologi Pancasila di media *online* Kompas.com dan Repblika.co.id?

### **D. TUJUAN PENELITIAN**

Tujuan penelitian ini yaitu, untuk mengetahui *Framing* berita tentang rancangan undang-undang Haluan Ideologi Pancasila di media *online* Kompas.com dan Repblika.co.id.

### **E. MANFAAT PENELITIAN**

Penelitian ini memiliki manfaat, antarlain :

1. Manfaat teoritis
  - a. Penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan untuk mengetahui secara jelas dan rinci mengenai pembingkaiian rancangan undang-undang yang disampaikan oleh media Kompas.com dan Republika *online*.
  - b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan andil terhadap pertumbuhan keilmuan komunikasi khususnya bagi penelitaian analisis *framing* Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki.

---

<sup>14</sup> Alex Sobur, Analisis Teks Media, hlm.163

## 2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi masyarakat mengenai pembingkai berita rancangan undang-undang Haluan Ideologi Pancasila yang dilakukan oleh media *online*.
- b. Bagi mahasiswa dakwah khususnya, akan menjadi referensi mengingat bahwa lahan garapan mereka adalah konteks social.
- c. Bagi masyarakat, penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan keilmuan dan menambah pengetahuan mengenai pembingkai berita yang ada di media.

### d. TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian tentang analisis *framing* telah banyak dilakukan dalam ranah Ilmu Komunikasi. Tinjauan pustaka ditujukan agar penelitian tidak memiliki kesamaan dalam segala hal termasuk objek penelitian ataupun permasalahan yang akan diteliti. Selain itu juga digunakan sebagai perbandingan terhadap penelitian yang sudah ada.

*Pertama*, skripsi Nur Aisyah Wulandari, mahasiswa jurusan Komunikasi Fakultas Ilmu Dakwah Dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2014. Skripsi dengan judul “Analisis *Framing* Terhadap Foto PreWedding Pada Detik.com dan Kompas .com”.<sup>15</sup> Tujuan dari penelitian tersebut, pertama untuk mengetahui bagaimana Detik.com dan Kompas.com mengemas berita mengenai larangan foto pre wedding. Kedua untuk mengetahui bagaimana bingkai pemberitaan larangan foto pre wedding dalam model Robert N. Entman. Persamaan yang dilakukan penulis adalah sama-sama menganalisis *framing* berita di media *online*. Perbedaan penelitian ini terletak pada media *online* yang diteliti yaitu detik.com.

*Kedua*, skripsi M. Shandika Alkafi, mahasiswa jurusan komunikasi dan penyiaran islam fakultas dakwah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto tahun

---

<sup>15</sup> Wulandari, Nur Aisyah. *Analisis framing terhadap foto prewedding pada detik.com dan kompas.com*. (Skripsi S1 Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Komunikasi Dan Ilmu Dakwah Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014)

2020. Skripsi dengan judul “Politik Kekuasaan Dalam Pemberitaan Media *Online* Analisis *Framing* Pemberitaan Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi di Detik.Com”.<sup>16</sup> Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran bagaimana media *online* detik.com membingkai pemberitaan Revisi UU KPK. Persamaan yang dilakukan penulis adalah sama sama menganalisis *framing* berita *online*. Perbedaan penelitian ini terletak pada media yang diteliti yaitu detik.com.

*Ketiga*, Skripsi Laelatul Maghfiroh, mahasiswa jurusan komunikasi dan penyiaran islam fakultas dakwah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto tahun 2020. Skripsi dengan judul “Analisis *Framing* Pemberitaan Kontroversi Film The Santri Di Media *Online* Voa-Islam.Com Dan Tribunnews.Com”<sup>17</sup> Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pemberitaan kontroversi film The Santri pada media *online* di Voa-islam.com dan Tribunnews.com. Persamaan yang dilakukan penulis adalah sama sama menganalisis *framing* berita *online*. Perbedaan penelitian ini terletak pada media yang diteliti yaitu media *online* di Voa-islam.com dan Tribunnews.com.

## e. METODE PENELITIAN

### 1. Paradigma Penelitian

Analisis *framing* merupakan salah satu metode analisis teks yang berada dalam kategori penelitian konstruksionis. Paradigma merupakan pola atau model tentang bagaimana sesuatu distruktur (bagian dan hubungannya) atau bagaimana bagian-bagian berfungsi (perilaku yang di dalamnya ada konteks khusus atau dimensi waktu).<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Alkafi, M. Shandika. *Politik Kekuasaan Dalam Pemberitaan Media Online Analisis Framing Pemberitaan Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi Di Detik.Com*. (Skripsi S1 Program Studi Komunikasi Dan Penyiaran Islam Institute Agama Islam Negeri Purwokerto, 2020)

<sup>17</sup> Maghfiro, Laelatul, *Analisis Framing Pemberitaan Kontroversi Film The Santri Di Media Online Voa-Islam.Com Dan Tribunnews.Com* (Skripsi S1 Program Studi Komunikasi Dan Penyiaran Islam Institute Agama Islam Negeri Purwokerto, 2020)

<sup>18</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 49.

Konsep konstruksionis di perkenalkan oleh peter L. Berger, realitas tidak dibentuk secara ilmiah. Tetapi karena dibentuk dan dikonstruksi. Dengan pemahaman yang semacam ini, jadi realitas berwajah ganda atau plural. Setiap khalayak mempunyai kosntruksi masing-masing atas suatu realitas. Selain plural, realitas juga bersifat dinamis.<sup>19</sup>

## 2. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan atau *library research*.<sup>20</sup> Karena data yang dibutuhkan dalam penelitian ini berasal dari bahan pustaka. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan tehnik analisis *framing* Zhongdan Pan dan Gerald M. Kosicki. Penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang mendeskripsikan kondisi fisik dan kondisi sosial berdasarkan fakta dan data yang sebenarnya.<sup>21</sup> Penelitian ini tidak menggunakan angka atau statistic, akan tetapi menekankan pada data deskriptif yang bersifat kata-kata tertulis maupun lisan.

Kriteria data dalam penelitian kualitatif adalah data yang pasti yaitu data yang sebenarnya terjadi bukan data yang sekedar terlihat, terucap, tetapi data yang mengandung makna dibalik yang terlihat dan terucap.<sup>22</sup>

## 3. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah media *online* kompas.com dan republic.co.id sementara yang menjadi objeknya adalah pemberitaan mengenai RUU HIP.

## 4. Sumber Data

Data yang diambil untuk penelitian ini adalah :

---

<sup>19</sup> Eriyanto, *Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media*, (Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2002), hlm. 16.

<sup>20</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabet, 2009), hlm. 314

<sup>21</sup> Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm.105.

<sup>22</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV. Alfabeta, 2005), hal.2.

a. Sumber primer

Data primer merupakan informasi yang dikumpulkan peneliti langsung dari sumbernya. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah bersumber dari media Kompas.com dan Republika *Online*.

b. Sumber Sekunder

Data sekunder adalah informasi yang telah dikumpulkan oleh pihak lain. Data pendukung lainnya yang dapat dijadikan sumber bisa berupa dokumen, arsip, maupun data-data tertentu yang didapat oleh peneliti dari berbagai sumber.

5. Tehnik Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian ini, penulis melakukan pengumpulan data dengan teknik dokumentasi. Teknik dokumentasi yang dilakukan adalah mengumpulkan teks-teks artikel dalam berita terkait pemberitaan RUU HIP. Selain itu, peneliti menambah data-data yang digunakan melalui penghimpunan data-data, literatur dan kajian pustaka terkait permasalahan yang diangkat. Pengumpulan dokumentasi tersebut digunakan untuk memberikan gambaran dan informasi yang mendukung dalam menganalisis data pada penelitian ini. Penulis menggunakan sumber data primer pada media *online* kompas.com dan republic.co.id yang memuat berita tentang RUU HIP.

6. Tahapan Penelitian

a. Tehnik pengumpulan data

Istrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang dapat digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitian, adapun yang menjadi instrumen penelitian adalah:

b. Analisis Teks

Penelitian analisis teks yang diambil dalam media *online*. Mengenai RUU HIP pada kompas.com dan republic.co.id, yang penulis pilih dari berita yang dimuat dalam rubrik harian repblik dan kompas.com, yakni sebanyak 2 berita. Diantaranya : MUI Ingatkan DPR Segera Cabut RUU HIP dari Prolegnas(Republik.co.id 26 Agustus 2020) dan MUI: RUU HIP

Bertentangan dan Mengancam Eksistensi Pancasila(Kompas.com 26 Agustus 2020)

c. Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, data kemudian di susun secara sistematis.

d. Tehnik Analisis Data

Teknik analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengolongkan data, memilah-milah data dan menjadikannya satuan yang dapat dikelola, mensintesiskanya, mencari dan menemukan pola, memilah mana yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.<sup>23</sup>

Dalam pemberitaan RUU HIP pada republic.co.id dan kompas.com, penulis menggunakan tehnik analisis *framing* model Zhongdan Pan dan Gerald M. Kosicki. Dalam konsep Entman digunakan ntuk menggambarkan proses seleksi dan menonjolkan aspek tertentu dari realitas oleh media. *Framing* memberikan tekanan lebih pada bagaiman teks komunikasi ditampilkan dan bagian mana yang ditonjolkan oleh pembuat teks.

**f. SISTEMATIKA PEMBAHASAN**

Sistematika penulisan merupakan suatu susunan atau urutan dari penulisan skripsi untuk memudahkan dalam memahami isi skripsi ini, maka dalam sistematika penulisan, penulis membagi dalam lima bab, yaitu:

BAB I, memuat pendahuluan yang berisi bentuk dasar penyusunan dan langkah penelitian yang meliputi dari latar belakang masalah, definisi oprasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II, pada bab ini memuat penjabaran teori yang berisi tentang penjelasan teori Industri media pers, Ideologi Media, Industrialisasi Media, *Framing* Berita, dan Teknik Analisis *Framing* Berita.

---

<sup>23</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 248.

BAB III, Metode penelitian ini berisi analisis terhadap teks yang meliputi Jenis Penelitian, Sumber Data, Teknik Analisis Data yang disusun untuk menemukan jawaban dari rumusan masalah penelitian.

BAB IV, memuat penyajian data, analisis *framing* berdasarkan teori Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki.

BAB V, yaitu penutup yang meliputi kesimpulan dan saran yang merupakan rangkaian dari keseluruhan hasil secara singkat.

Bagian akhir penulisan ini terdiri dari daftar pustaka, lampiran-lampiran serta daftar riwayat hidup.



## BAB II

### PENJABARAN TEORI

#### A. PENGERTIAN PERS

Pers berasal dari kata pers (Belanda), press (Inggris), dan presse (Prancis), berarti tekan atau cetak. Secara terminologis, pers berarti media massa cetak, atau yang lebih dikenal dengan istilah media cetak. Pers merupakan bagian dari lembaga social atau lembaga kemasyarakatan. Pers bisa diartikan sebagai subsistem dari sistem pemerintahan tempat ia beroperasi. Pers merupakan sebuah sistem yang terbuka dan probabilistic. Artinya, pers tidak bebas dari pengaruh lingkungan, selain itu pers juga memiliki pengaruh yang tidak terduga terhadap lingkungannya.<sup>24</sup> Dalam arti sempit, pers hanya digolongkan sebagai produk-produk percetakan atau produk penerbitan yang melewati proses cetak. Contoh produk pers antara lain seperti koran, surat kabar harian, tabloid, majalah mingguan, majalah tengah bulanan, dan sebagainya yang dikenal sebagai media cetak.<sup>25</sup>

Surat kabar atau pers dalam arti sempit merupakan alat komunikasi massa yang memberikan kepada lembaga-lembaga komunikasi secara tercetak, lembaga-lembaga yang memenuhi syarat-syarat publisita, periodisita, universalita dan aktualita. Periodesita pada umumnya berarti satu hari sekali atau beberapa kali dalam sepekan.<sup>26</sup>

Di dalam undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang merupakan regulasi pers disebutkan mengenai fungsi pers yaitu sebagai media pendidikan, hiburan dan kontrol sosial. Di samping itu, pers juga dapat berfungsi sebagai lembaga ekonomi. Fungsi pers sebagai kontrol sosial sangat penting untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan baik korupsi, kolusi, dan nepotisme, maupun penyelewengan dan penyimpangan lainnya. Kontrol sosial dimaksudkan agar kehidupan bermasyarakat dan bernegara menjadi lebih baik.

---

<sup>24</sup> Nurani Soyomukti, *Pengantar Ilmu Komunikasi*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012) Hlm. 207

<sup>25</sup> F. Rachmadi, *Analisis Deskriptif Sistem Pers di Berbagai Negara* (Jakarta: PT. Gramedia, 1990), hlm. 9-10.

<sup>26</sup> Oey Hong Lee, *Publistik Pers* (Jakarta: Ichtiar, 1965), hlm. 109.

## B. KEBEBASAN PERS

Kebebasan pers dalam Bahasa Inggrisnya disebut Freedom Of Opinion And Expression dan Freedom Of The Speech. John C. Merrill (1989) merumuskan kebebasan pers sebagai suatu yang riil yang memungkinkan para pekerja pers bisa memilih, menentukan dan mengerjakan tugas sesuai keinginan mereka. Bebas dari (negative) dan bebas untuk (positif).<sup>27</sup>

Kebebasan pers dalam arti yang seluas-luasnya adalah pengungkapan kebebasan pendapat secara kolektif dari hak berpendapat secara individu yang diterima sebagai hak asasi manusia. Menurut pandangan Unesco, masyarakat demokratis dibangun atas dasar konsepsi kedaulatan rakyat, dan keinginan-keinginan pada masyarakat demokratis itu ditentukan oleh opini publik yang dinyatakan secara terbuka. Hak publik untuk mengetahui seperti demikian merupakan inti dari kebebasan pers, sedangkan wartawan profesional, penulis dan produsen hanya pelaksana berlangsung. Tidak adanya kebebasan pers berarti tidak adanya hak asasi manusia.<sup>28</sup> Dengan demikian kebebasan pers bersumber dari kedaulatan rakyat dan milik rakyat, yang ditegakkan untuk kepentingan rakyat.

Indonesia mengatur dan merumuskan sistem pers yang mana pers merupakan lembaga kemasyarakatan atau lembaga sosial yang memiliki sifat-sifat kelembagaan. Dengan demikian lembaga pers akan menyelenggarakan dan melayani informasi dengan cepat dan teratur. Berita yang diterbitkan dan disebarluaskan oleh pers pada khalayak umum itu diolah dalam sebuah organisasi pers. Karenanya pers kemudian dapat berkembang sebagai sebuah industri jasa yang bersifat otonom dan profesional serta mendatangkan keuntungan finansial.

Perkembangan pers sebagai industri memberikan makna bahwa pers melayani kepentingan bisnis, sebagaimana yang telah lama terjadi di negara kapitalis demikian juga pers dapat melayani kepentingan para pejuang

---

<sup>27</sup> Masduki, *Kebebasan Pers dan Kode Etik Jurnalistik* (UII Press : Yogyakarta, Cet. 2, 2005) hlm. 8

<sup>28</sup> M. Ridlo 'Eisy, *Peranan Media Dalam Masyarakat, Kemerdekaan Pers Fondasi Penegakan Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Dewan Pers, 2007), hlm. 60

kemerdekaan seperti yang pernah terjadi di Indonesia pada masa sebelum dan awal kemerdekaan.<sup>29</sup>

Kebebasan pers Indonesia diatur dalam Pasal 28 UUD 1945 yang menyatakan setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Implementasi atas pasal itu mengandung penafsiran bahwa yang diamanatkan oleh pasal 28 adalah undang-undang yang menetapkan kebebasan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya. Penjabaran atas pasal itu diterbitkan pula berbagai peraturan perundangundangan, dan Kode Etik Wartawan Indonesia oleh Dewan Pers. Kendati pun pasal 28, khususnya pasal 28F, telah memberi jaminan kebebasan pers, akan tetapi bukan berarti kebebasan tersebut dapat dilaksanakan tanpa norma atau nilai-nilai.<sup>30</sup>

Kebebasan pers harus diikuti dengan tanggung jawab sesuai dengan kode etik jurnalistik. Prinsip utama kode etik jurnalistik berupa akurasi, independensi, objektivitas, balance, fairness, imparialitas, menghormati privasi, akuntabilitas kepada public.<sup>31</sup> Jika pers selalu melanggar kode etik jurnalistik dan lebih mementingkan kepentingan pribadinya, maka akan timbul pertanyaan untuk siapa “kebebasan” itu dibuat. Kebebasan pers bukan dimaksudkan untuk pers sendiri ataupun suatu organisasi pers, melainkan untuk kepentingan public dan kepentingan rakyat. Namun, karena publik tidak mungkin bisa mengakses informasi secara langsung walaupun sebenarnya boleh, karena merupakan salah satu hak sipil, maka diperlukanlah pers, yaitu pers yang bebas. Bukan bebas dalam

---

<sup>29</sup> Anwar Arifin, *Sistem Komunikasi Indonesia*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011) Hlm. 120

<sup>30</sup> Syafriadi, *Hukum Pers dalam Ketatanegaraan Indonesia*, (Yogyakarta: Suluh Media, 2018), hlm. 144.

<sup>31</sup> Zulkarimein Nasution, *Etika Jurnalisme Prinsip-prinsip Dasar*, Jakarta: Cet 1 Rajawali Pers, 2015, h.115

arti kata “semaunya sendiri” melainkan bebas mengakses informasi, beban meliput, bebas menulis dan menyatakan pendapat secara tanggung jawab.<sup>32</sup>

### C. PENGERTIAN MEDIA

Media berasal dari bahasa Latin *medium* yang berarti perantara, pengantar atau tengah. Dalam pengertian tunggal dipakai istilah *medium*, sedangkan dalam pengertian jamak dipakai istilah *media*. Istilah *media* merupakan kata yang berasal dari dalam bahasa Inggris yang kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia, dengan makna sebagai alat komunikasi, perantara atau penghubung.<sup>33</sup> Media yang dimaksud dalam hal ini adalah media massa. Media massa merupakan media yang umum digunakan pada masa kini untuk menyampaikan berita kepada masyarakat secara serempak.

Menurut Hafied Cangara Media adalah alat atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan informasi dari komunikator kepada khalayak, sedangkan pengertian media massa sendiri alat atau media yang dapat digunakan dalam penyampaian pesan dari suatu sumber kepada khalayak. Beberapa media massa yang masih tetap ada sampai saat ini seperti surat kabar, film, radio dan televisi.<sup>34</sup>

Media massa sebagai sarana informasi adalah alat untuk menyampaikan pesan kepada khalayak. Media massa dapat dikelompokkan menjadi dua jenis yaitu:<sup>35</sup>

1. Media massa cetak: seperti surat kabar, majalah, tabloid, jurnal, dan buku.
2. Media massa elektronik: seperti televisi, radio, film dan *online*.

Shirley Biagi menyebutkan tiga konsep penting tentang media massa yaitu:<sup>36</sup>

---

<sup>32</sup> Syafriadi, *Hukum Pers dalam Ketatanegaraan Indonesia*, (Yogyakarta: Suluh Media, 2018), hlm. 144.

<sup>33</sup> Anwar Arifin, *Dakwah Kontemporer (Sebuah Studi Komunikasi)*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm. 89.

<sup>34</sup> Hafied Cangara, 2010. *Pengantar ilmu komunikasi*. Jakarta: Rajawali Pers. hal.123.

<sup>35</sup> Dede Lilis, 2014, *Media Anak Indonesia Representasi Idola Anak dalam Majalah Anak-Anak*, Jakarta; Pustaka Obor Indonesia. Hal 3

<sup>36</sup> Shirley Biagi, *Media/Impact: Pengantar Media Massa*, (Jakarta: salemba Humanika, 2010), hlm. 10.

1. Media massa adalah suatu bentuk usaha yang berpusat pada keuntungan. Media massa merupakan perusahaan yang menghasilkan keuntungan melalui jasa.
2. Perkembangan dan perubahan dalam pengiriman dan pengonsumsi media massa, dipengaruhi oleh perkembangan teknologi. Semakin maju teknologi, akan mempermudah penyebaran informasi ke masyarakat.
3. Media massa senantiasa mencerminkan sekaligus mempengaruhi kehidupan masyarakat, dunia politik, dan budaya. Media massa selain sebagai media penyiar informasi, media massa juga dapat dengan mudah mempengaruhi pola pikir dan kebiasaan masyarakat.

#### **D. IDEOLOGI MEDIA**

Ideologi secara etimologis ideologi berasal dari kata “idea” dan “logos”. Idea yang berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita. Kata idea berasal dari bahasa Yunani ideos yang berarti bentuk atau idean yang berarti melihat, sedangkan logos berarti ilmu. Ideologi dapat diartikan sebagai ilmu pengertian-pengertian dasar ide-ide (the science of ideas) atau ajaran tentang pengertian-pengertian dasar. Dengan demikian Ide dapat diartikan sebagai cita-cita yang memiliki sifat tetap dan yang musti dicapai”.<sup>37</sup>

Cita-cita ini bisa berarti gagasan, pandangan atau faham yang dapat diyakini sebagai kebenaran. Ideologi pada hakekatnya juga dapat dianggap sebagai visi yang komprehensif, yaitu sebagai cara memandang segala sesuatu (Weltanschauung). Secara umum ideologi berarti kumpulan ide yang digagas atau diajukan oleh kelas yang paling dominan pada seluruh masyarakat. Tujuan utama dibalik adanya ideologi adalah untuk menawarkan suatu perubahan melalui proses pemikiran normatif. Ideologi merupakan sistem pemikiran yang abstrak, dimana tidak hanya sekadar membentuk ide yang nantinya akan diterapkan pada masalah publik. Konsep ideologi pada nantinya akan menjadi inti politik. Secara implisit, setiap

---

<sup>37</sup> Syamsudin, M dkk. 2009. *Pendidikan Pancasila Menetapkan Pancasila dalam Konteks Keislaman dan Keindonesiaan*. (Yogyakarta: Total Media) hlm 98

pemikiran politik mengikuti sebuah ideologi, walaupun tidak diletakkan sebagai sistem berpikir yang eksplisit.<sup>38</sup>

Dalam konteks media massa, pembentukan ideologi tidak dapat dilakukan di ruang kosong yang berarti pembentukan ideologi tidak dapat tercipta begitu saja namun ideologi tercipta karena ada yang menciptakan ideologi tersebut. Berita diproduksi dengan memasukan ideologi dominan tertentu juga bisa bermakna politik baik secara penandaan dan pemaknaan berita tersebut.<sup>39</sup>

Gramsci mengemukakan bahwasanya hubungan antara pemilik modal dan pekerja yang dalam konteks media massa antara wartawan dan pemilik industri media merupakan hubungan yang bersifat hegemonik.<sup>40</sup> Maka bisa di artikan bahwa pemilik industry memiliki pengaruh besar terhadap berita yang diperoleh oleh wartawan dan berita yang akan diterbitkan akan sesuai dengan ideologi perusahaan tersebut.

Raymond William menamakan ideologi sebagai himpunan atau kumpulan ide-ide yang tercipta dari seperangkat kepentingan material tertentu atau secara lebih luas dari sebuah kelas atau kelompok tertentu. Raymond mengklasifikasikan penggunaan ideologi tersebut menjadi tiga ranah yaitu.<sup>41</sup>

1. Sebuah sistem kepercayaan yang dimiliki oleh kelompok atau satu kelas tertentu. Definisi ini biasanya dipakai para psikolog yang menilai ideologi sebagai seperangkat sikap yang dibentuk dan terkumpul dalam bentuk yang koheren.
2. Sebuah sistem kepercayaan yang dibuat - ide palsu atau kesadaran palsu - yang bertentangan dengan pengetahuan ilmiah. Yang dimaksud disini adalah seperangkat kategori atau ide yang dibentuk di dalam kesadaran palsu, dimana organisasi atau kelompok masyarakat yang berkuasa atau dominan

---

<sup>38</sup> Ahmad Muttaqin. *Ideologi Dan Keberpihakan Media Massa*. Jurnal Dakwah dan Komunika Vol. 5, No. 2. (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2011).

<sup>39</sup> Muridan, dkk. *Wacana Agama Anti Terorisme Di Media Online: Penelitian Kolektif*. (Purwokerto: Stain Purwokerto, 2013). Hlm. 35

<sup>40</sup> Nezar Patria dan Andi Arief. Antonio Gramsci, *Negara dan Hegemoni*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999). Hlm. 124

<sup>41</sup> Acan Mahdi. *Berita Sebagai Representasi Ideologi Media (Sebuah Telaah Kritis)*. Jurnal Al-Hikmah Vol. 9, No. 2. (Pontianak: IAIN Pontianak, 2015). hlm. 209.

menggunakannya untuk mendominasi kelompok minoritas. Perangkat ideologi disiarkan kepada masyarakat sehingga akan membuat pemikiran yang serupa, dengan adanya hal tersebut akan memungkinkan individu untuk menciptakan kelompok yang dapat mendominasi. Hubungan yang terlihat alami atau biasa saja akan lebih mudah diterima sebagai kebenaran. Di sini, ideologi biasanya disebarkan melalui berbagai instrumen dari pendidikan, politik, hingga media massa.<sup>42</sup>

3. Ideologi adalah proses produksi yang menghasilkan makna dan ide. Ideologi ini merupakan istilah yang digunakan sebagai gambaran produksi makna.

Ketika media dilandasi oleh berbagai kepentingan baik kepentingan politik maupun kepentingan personal yang lain maka, ketika digunakan sebagai cermin realitas (*mirror of reality*). Media akan didakwa sebagai perumus realitas (*definer of reality*) sama seperti ideologi yang melandasinya. Beroperasinya ideologi dibalik media, tidak terlepas dari mekanisme ketersembunyian (*invisibility*) dan ketidaksadaran yang merupakan kondisi dari keberhasilan dari diterimanya sebuah ideologi. Artinya, sebuah ideologi dapat menyusup atau disusupkan dan menanamkan pengaruhnya melalui media. Hal ini tentunya akan dapat merubah pandangan setiap orang secara tidak sadar.<sup>43</sup>

## E. MEDIA MASSA

Perkembangan teknologi komunikasi kini telah semakin cepat dan semakin canggih, sehingga informasi dapat dikirimkan dengan sangat cepat dengan media komunikasi saat ini yaitu media *online*. Media *online* ini merupakan media yang sangat populer di kalangan masyarakat. Dengan menggunakan media ini kita dapat dengan mudah mengakses informasi kapanpun dan dimanapun. Selain berbagi informasi secara personal, media *online* juga bisa digunakan untuk berbagi informasi dengan banyak orang. Karenanya media *online* juga dapat disebut juga sebagai media massa.

---

<sup>42</sup> Acan Mahdi. *Berita Sebagai Representasi Ideologi*, hal 209

<sup>43</sup> Mahpuddin. *Ideologi Media Massa dan Pengembangan Civil Society*. Jurnal Academica Vol. 1, No. 2. (Palu: Jurnal Academica Universitas Tadulako, 2009). hlm. 194

Menurut Elizabeth-Noelle Neum yang dikutip oleh Nrudin, ada empat pokok yang membedakan antara komunikasi massa dengan komunikasi lainnya, yakni:<sup>44</sup>

1. Bersifat tidak langsung, artinya harus melalui media teknis.
2. Bersifat satu arah, artinya tidak ada interaksi antara peserta komunikasi (komunikator dan komunikan).
3. Bersifat terbuka, artinya ditunjukkan kepada publik yang terbatas dan anonim.
4. Mempunyai publik secara geografis besar.

Media massa bisa diartikan sebagai saluran atau alat komunikasi yang menghubungkan antara komunikator dan komunikan secara massal, berjumlah banyak, bertempat tinggal yang jauh, sangat heterogen dan menimbulkan efek tertentu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia media massa merupakan sarana dan saluran resmi sebagai alat komunikasi untuk menyebarkan berita dan pesan kepada masyarakat luas.<sup>45</sup> Sedangkan menurut Gerbner “mass Communication is the thecnologically and institutionally based production and distribution of the most broadly shared continuous flow of messages in industrial societies”, menggambarkan bahwa komunikasi massa menghasilkan suatu produk berupa pesan-pesan komunikasi yang disebarkan dan didistribusikan kepada khayalak luas secara terus menerus dalam jarak waktu yang tetap.<sup>46</sup>

Media massa sebagai alat untuk menyampaikan berita, penilaian dan gambaran umum tentang banyak hal. Media mempunyai kemampuan untuk berperan sebagai institusi yang dapat membentuk opini publik. Media juga berkembang menjadi kelompok penekan atas suatu ide atau gagasan yang direpresentasikan dalam konteks kehidupan yang lebih empiris.<sup>47</sup> Oleh karena itu, suatu peristiwa yang sama bisa dianggap berbeda oleh media. Berita dibuat tidak hanya untuk sekedar memberi informasi, tapi juga untuk membentuk opini publik.

---

<sup>44</sup> Nurudin, *Sistem Komunikasi Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2005), hlm. 36.

<sup>45</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta; Balai Pustaka.

<sup>46</sup> Elvinaro Ardianto dan Lukiati Komala E, 2005, *Komunikasi Massa Suatu Pengantar*, Bandung; Simbiosis Rekatama Media. Hal 3-4

<sup>47</sup> Alex Sobur, *Analisis Teks Media, Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik dan Analisis Framing*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 31

Media massa merupakan suatu penemuan teknologi yang luar biasa, memungkinkan banyak orang untuk melakukan komunikasi dan menyampaikan informasi. Dengan demikian, media massa berhasil mengatasi hambatan berupa waktu, tempat dan kondisi geografik. Terlebih dengan adanya undang-undang pers yang ditetapkan pemerintah untuk mengatur pers agar selalu menyampaikan berita yang riil. Hal ini menjadikan media sebagai sumber informasi sosial dan budaya yang paling dapat dipercaya. Media menentukan agenda publik dan konteks bagi kebanyakan apa yang masyarakat pikirkan dan apa yang diketahui tentang realitas. Sejumlah studi lain telah menunjukkan peran sentral media dalam komunitas dan solidaritas sosial.<sup>48</sup> Selain menghadirkan informasi wartawan juga memiliki kemampuan untuk menghadirkan opini publik. Sehingga begitu besarnya pengaruh media terhadap masyarakat, menyebabkan sejumlah pemilik modal tidak ragu menginvestasikan dana hingga teriliunan rupiah dalam bidang ini.<sup>49</sup>

Perkembangan media dan teknologi membuat Indonesia memiliki banyak perusahaan jasa yang bergerak dalam bidang pers. Dengan banyaknya media pers yang ada tentu saja akan memunculkan paham ideologi yang berbeda beda antara satu berita dengan berita yang lain dengan tema yang sama. Meski kebebasan sudah dianut oleh media namun sejatinya kebebasan itu tidak utuh dan terbatas dengan adanya kepentingan.<sup>50</sup>

## F. FRAMING BERITA

Gagasan mengenai *framing* pertama kali dikemukakan oleh Beterson (1955-1972). Awalnya, frame dimaknai sebagai struktur konseptual atau perangkat kepercayaan yang mengorganisir pandangan politik, kebijakan, dan wacana yang menyediakan kategori-kategori standar untuk mengapresiasi realita. Konsep ini kemudian dikembangkan oleh Goffman (1974), yang mengandaikan frame sebagai kepingan-kepingan perilaku strip of behavior yang membimbing individu dalam membaca realitas. Dalam perkembangan terakhir, konsep ini digunakan untuk

<sup>48</sup> Fathurin Zen, *NU Politik: analisis wacana media*, (Yogyakarta: LKis, 2004), hlm. 94.

<sup>49</sup> Fadhilah Zein, *Kezaliman Media Massa Terhadap Umat Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013), hlm. 7

<sup>50</sup> Agus Sudibyo, *Politik Media & Pertarungan Wacana*, (Yogyakarta: LKis, 2001), hlm 2

menggambarkan proses penyeleksian dan penyorotan aspek-aspek khusus sebuah realita oleh media.<sup>51</sup>

Analisis *Framing* merupakan sebuah cara bagaimana peristiwa disajikan oleh media. Penyajian berita ini dilakukan dengan cara menekankan bagian tertentu, atau dengan kata lain menonjolkan aspek atau ciri tertentu dan mengubah sudut pandang bercerita dari suatu realitas. Dengan cara tersebut media dapat menghubungkan dan menonjolkan peristiwa sehingga makna dari peristiwa tersebut lebih mudah diingat oleh khalayak. Analisis *framing* secara sederhana dapat digambarkan untuk mengetahui bagaimana realitas( peristiwa, actor, kelompok, atau apa saja) dibingkai oleh media melalui proses kontruksi.<sup>52</sup> Dalam perspektif komunikasi, analisis *framing* dipakai untuk membedah cara-cara atau ideologi media saat mengkontruksi fakta.<sup>53</sup> Secara sederhana analisis *framing* dapat dikatakan sebagai membingkai sebuah berita. Ada beberapa devinisi mengenai *framing* yaitu:

#### 1. Analisis *Framing* Murr-ray Edelman<sup>54</sup>

Gagasan Edelman mengenai *framing* dipaparkan dalam tulisannya, “Contestable Categories and Public Opinion”. Menurut Edelman, apa yang diketahui tentang realitas atau tentang dunia tergantung bagaimana kita membingkai dan mengkonstruksi atau menafsirkan realitas tersebut. Menurutnya, realitas yang sama bisa jadi menghasilkan realitas yang berbeda ketika realitas tersebut dibingkai atau dikonstruksi dengan cara yang berbeda.

Menurut Edelman, kategorisasi merupakan kekuatan besar dalam mempengaruhi pikiran serta kesadaran publik. Kategori dalam mendefinisikan peristiwa tersebut dapat menentukan bagaimana masalah didefinisikan, apa

---

<sup>51</sup> Arifatul Choiri Fauzi, *Kabar-Kabar Kekerasan Dari Bali*, (Yogyakarta: LkiS Pelangi Aksara, 2007), h. 23.

<sup>52</sup> Eriyanto, *Analisis Framing: Kontruksi, Ideologi dan Politik Media*, (Yogyakarta: LkiS, 2002), hlm. 3

<sup>53</sup> Alex Sibur, *Analisis Teks: Suatu Pengantar Untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotika dan Analisis Framing* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), hlm. 162

<sup>54</sup> Eriyanto, *Analisis Framing (Kontruksi, Ideologi, dan Politik Media)* , (Yogyakarta:Lkis, 2002), 185.

efek yang direncanakan , ruang lingkup masalah dan penyelesaian efektif yang direkomendasikan. Ada 2 pokok kategorisasi menurut Edelman, yaitu :

a. Kesalahan Kategorisasi

Edelman lebih banyak memusatkan perhatian pada bagaimana politisi menciptakan bahasa dan simbol politik untuk mempengaruhi opini publik. Dalam pandangan Edelman, politik tidak lain adalah permainan simbol-simbil. Karena, lewat simbol tersebut, realitas politik diciptakan dan dibentuk. Salah satu gagasan utama Edelman adalah dapat mengarahkan pandangan khalayak akan suatu isu dan membentuk pengertian mereka akan sesuatu isu. Edelman juga menolak asumsi yang mengatakan seolah opini adalah suatu yang tetap. Menurutnya, opini harus dilihat sebagai sesuatu yang dinamis yang bisa diciptakan terus-menerus. Karakter dan sebab-akibat dari suatu peristiwa dapat berubah secara radikal dengan memakai kategorisasi tertentu.

b. Rubrikasi

Rubrikasi menjadi yang sangat penting dalam mengkategorikan pemberitaan. Sebab, rubrikasi bisa dapat menentukan bagaimana peristiwa dan fenomena harus dijelaskan.

## 2. Analisis *Framing* William A. Gomson dan Modigliani

Model ini beranggapan frame sebagai suatu cara bercerita atau gugusan ide-ide yang tersusun sedemikian rupa dan menghadirkan konstruksi makna dari peristiwa yang berkaitan dengan suatu wacana. Cara pandang wartawan ini disebut oleh Gomson dan Modigliani sebagai sebuah kemasan (package). Package merupakan rangkaian ide yang menunjukkan isu apa yang dibicarakan dan peristiwa mana yang relevan.<sup>55</sup>

Kemasan atau package tersebut dibayangkan sebagai wadah atau struktur data yang mengorganisir sejumlah informasi yang menunjukkan posisi atau kecenderungan politik, serta membantu komunikator untuk menjelaskan muatanmuatan dibalik suatu isu ataupun peristiwa. Keberadaan

---

<sup>55</sup> Rachmat Kriyantono, *Teknik Praktis Riset Komunikasi*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2009), hlm, 257

suatu package dapat terlihat dari adanya gagasan sentral yang kemudian didukung oleh perangkat-perangkat wacana, seperti kata, kalimat, pemakaian gambar atau grafik tertentu, proposisi dan sebagainya

*Framing* Gomson dan Modigliani dapat digambarkan seagai berikut.<sup>56</sup>

**Tabel 2.0 Teori *Framing* Gomson dan Modigliani**

Perangkat <i>Framing</i> ( <i>Framing Device</i> )	Perangkat Penalaran (Reasoning Devices)
<b>Methapors</b> Perumpaan atau pengandaian	<b>Roots</b> Analisis kausal atau sebab-akibat.
<b>Catchprases</b> Frase yang menarik, kontras, menonjol dalam suatu wacana, berupa jargon atau slogan.	<b>Appealse to principle</b> Premis dasar, klaim-klaim moral.
<b>Exemplaar</b> Mengaitkan bingkai dengan contoh (bisa teori, perbandingan) yang memperjelas bingkai.	<b>Consequences</b> Efek atau konsekuensi yang didapat dari bingkai.
<b>Depiction</b> Penggambaran atau pelukisan suatu isu yang bersifat konotatif. Dapat berupa kosakata, leksikon untuk melabeli sesuatu. <b>Visual Images</b> Gambar, grafik, atau citra yang mendukung bingkai secara keseluruhan.	

### 3. Analisis *Framing* Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki<sup>57</sup>

Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki mendefinisikan *framing* sebagai proses membuat suatu pesan agar terlihat lebih menonjol, hal ini dapat dilakukan dengan cara menempatkan informasi lebih daripada yang lain

<sup>56</sup> Eriyanto, *Analisis Framing (Kontruksi, Ideologi, dan Politik Media)*, (Yogyakarta:Lkis, 2002), 262.

<sup>57</sup> Eriyanto, *Analisis Framing*, hal 290

sehingga khalayak lebih tertuju pada pesan tersebut. Menurut Pan dan Kosicki ada dua konsep dari *framing* yang saling berkaitan.

- a. Konsepsi Psikologi, *Framing* ini lebih menekankan pada bagaimana seseorang memproses informasi dalam dirinya. Disini, *framing* dilihat sebagai penempatan informasi dalam suatu konteks yang khusus dan menempatkan elemen tertentu dari suatu isu atau peristiwa dengan penempatan lebih menonjol dalam kognisi seseorang.
- b. Konsepsi Sosiologis, *framing* disini dipahami sebagai proses bagaimana seseorang mengklasifikasikan, mengorganisasikan, dan menafsirkan pengalaman sosialnya untuk mengerti dirinya dan realitas diluar dirinya.

Secara umum konsepsi psikologis melihat frame sebagai persoalan internal pikiran seseorang, dan konsepsi sosiologis melihat frame dari sisi lingkungan sosial yang dikonstruksi seseorang.

Pan dan Kosicki melalui tulisannya "*Framing Analysis: An Approach to News Discourse*" mengoperasionalkan empat dimensi struktural teks berita sebagai perangkat *framing*: sintaksis, skrip, tematik, dan retorik. Keempat dimensi struktural ini akan membentuk semacam tema yang mempertautkan elemen-elemen semantik narasi berita dalam suatu koherensi global. Model pemikiran ini berasumsi bahwasanya setiap berita atau pemberitaan suatu media akan selalu mempunyai frame. Hal inilah yang kemudian menjadikan *frame* berita berfungsi sebagai pusat organisasi ide. Frame merupakan suatu ide yang dihubungkan dengan elemen yang berbeda dalam teks berita kutipan sumber, latar informasi, pemakaian kata atau kalimat tertentu ke dalam teks secara keseluruhan. Frame berhubungan dengan makna. Bagaimana seseorang memaknai suatu peristiwa, dapat dilihat dari perangkat tanda yang dimunculkan dalam teks.<sup>58</sup>

Dalam pendekatan Pan and Kosicki, membagi perangkat *framing* kedalam empat struktur besar. Yang pertama adalah sintaksis. Unsur

---

<sup>58</sup> Alex Sobur, *Analisis Teks Media: Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik, dan Analisis Framing*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), hlm. 175

Sintaksis berhubungan dengan headline berita, lead berita, latar informasi, pernyataan, opini, kutipan, pengamatan atas peristiwa ke dalam bentuk susunan kalimat.

Struktur yang kedua adalah struktur Skrip. Struktur ini berhubungan dengan cara wartawan atau jurnalis mengisahkan berita dan mengemas peristiwa.

Struktur yang ketiga adalah struktur Tematik. Struktur ini menekankan pada hubungan antar kalimat yang membentuk teks secara keseluruhan.

Struktur yang keempat adalah Struktur Retoris. Struktur ini menerangkan tentang cara wartawan memakai pilihan kata, grafik dan idiom yang dipakai bukan hanya untuk mendukung tulisan. Untuk itu, model analisis Pan and Kosicki ini digambarkan dalam bentuk skema berikut:<sup>59</sup>

**Tabel 3.0 Teori *Framing* Pan and Kosicki**

<b>STRUKTUR</b>	<b>PERANGKAT <i>FRAMING</i></b>	<b>UNIT YANG DIAMATI</b>
<b>SINTAKSIS</b> Cara Wartawan dalam Menyusun Berita	Skema Berita	Headline, lead, latar informasi, kutipan sumber, pernyataan, penutup.
<b>SKRIP</b> Cara wartawan menyusun fakta	Kelengkapan berita	5W + 1H
<b>TEMATIK</b> Cara wartawan dalam menulis fakta.	Detail. Koherensi Bentuk Kalimat Kata Ganti	Paragraf, proposisi, kalimat, hubungan antar kalimat.
<b>RETORIS</b> Cara wartawan menekankan fakta	Leksikon Grafis Metafora	Kata, idiom, gambar/foto, grafik.

<sup>59</sup> Eriyanto, *Analisis Framing*, 256

a. Sintaksis

Sintaksis ialah suatu susunan atau frase dalam kalimat. Dalam wacana berita, sintaksis menunjuk pada pengertian susunan dari bagian berita, yaitu *headline*, *lead*, latar informasi, sumber dan penutup dalam satu kesatuan teks berita secara keseluruhan. Bentuk sintaksis yang paling populer adalah struktur piramida terbalik yang dimulai dengan judul *headline*, *lead*, episode, latar, dan penutup.<sup>60</sup>

1. *Headline* merupakan aspek sintaksis dengan tingkat kemonjolan tinggi yang menunjukkan kecenderungan berita. *Headline* mempunyai fungsi *framing* yang kuat. *Headline* digunakan untuk menunjukkan bagaimana wartawan mengkonstruksi suatu isu.
2. *Lead* adalah perangkat sintaksis lain yang sering digunakan. *Lead* yang baik umumnya membentangkan sudut pandang dari berita, menunjukkan perspektif tertentu dari peristiwa yang diberitakan.
3. Latar merupakan bagian berita yang dapat mempengaruhi makna yang ingin ditampilkan wartawan. Seorang wartawan ketika menulis berita biasanya mengemukakan latar belakang atas peristiwa yang ditulis. Latar yang dipilih menentukan ke arah mana pandangan khalayak hendak dibawa. Latar umumnya ditampilkan di awal sebelum pendapat wartawan yang sebenarnya muncul.
4. Kutipan sumber adalah bagian berita yang menekankan bahwa berita yang ditulis oleh wartawan bukan pendapatnya semata, melainkan juga pendapat orang lain yang mempunyai kepentingan tertentu. Pengutipan sumber menjadi perangkat *framing* atas tiga hal. *Pertama*, mengklaim kebenaran dari pernyataan yang dibuat dengan mendasarkan diri pada klaim otoritas akademik. *Kedua*, menghubungkan poin tertentu dari pandangannya kepada pejabat yang berwenang. *Ketiga*, mengecilkan pendapat tertentu yang dihubungkan

---

<sup>60</sup> Eriyanto, *Analisis Framing* 257

dengan pandangan yang mayoritas sehingga pandangan tersebut tampak sebagai menyimpang.

b. Skrip

Laporan berita yang sering disusun sebagai suatu cerita. Karena dua hal, *pertama*, banyak laporan berita yang berusaha menunjukkan hubungan, peristiwa yang ditulis merupakan kelanjutan dari peristiwa sebelumnya. *Kedua*, berita umumnya mempunyai orientasi menghubungkan teks yang ditulis dengan lingkungan komunal pembaca. Bentuk umum dari struktur skrip ini adalah pola 5W+1H (*who, what, when where, why, dan how*). Meskipun pola ini tidak selalu dapat dijumpai dalam setiap berita yang ditampilkan, kategori informasi ini yang diharapkan diambil oleh wartawan untuk dilaporkan.<sup>61</sup>

c. Tematik

Bagi Pan dan Kosicki, berita adalah sama halnya seperti sebuah pengujian hipotesis mengenai peristiwa yang diliput, sumber yang dikutip, dan pernyataan yang diungkapkan. Struktur ini berhubungan dengan bagaimana fakta itu ditulis. Bagaimana kalimat yang akan dipakai, bagaimana menempatkan suatu sumber dan menulis ke dalam teks berita secara keluruhan.<sup>62</sup>Perangkat dari struktur ini diantaranya:<sup>63</sup>

1. *Detail*, merupakan elemen yang berelasi dengan kontrol informasi yang ditampilkan seseorang wartawan. Ia akan menampilkan secara lebih informasi yang dianggap menguntungkan dirinya atau citra yang baik.
2. *Koherensi*, sebagai penataan secara rapi baik realitas dan gagasan, fakta, dan ide ke dalam satu untaian yang logis sehingga menjadikan mudah untuk dipahami yang terkandung didalamnya. Koherensi dapat ditampilkan melalui hubungan sebab-akibat dan bisa juga sebagai penjelas.

<sup>61</sup> Eriyanto, *Analisis Framing*, hlm 260-261

<sup>62</sup> Eriyanto, *Analisis Framing*, hlm. 262-264.

<sup>63</sup> Aswad Ishak, *Mix Methodology dalam Penelitian Komunikasi*, (Yogyakarta: Aspiikom, 2011), hlm. 130-132.

3. *Bentuk kalimat*, adalah sisi pemakaian kalimat yang berelasi dengan cara berpikir logis, yaitu prinsip kausalitas. Bentuk kalimat tidak hanya menjadi persoalan teknis kebenaran atau bahasa, tetapi menentukan makna yang dibentuk oleh susunan kalimat.
4. *Kata ganti*, digunakan untuk melakukan manipulasi bahasa dengan membuat suatu komunitas imajinatif agar berita terlihat menarik. Penulis menggunakan kata-kata yang berbeda dalam sebuah berita.

d. Retoris

Struktur ini menggambarkan pilihan gaya atau kata yang akan dipilih untuk menekankan arti yang ingin ditonjolkan. Struktur retorik digunakan untuk membuat citra, meningkatkan kemenonjolan pada sisi tertentu dan meningkatkan gambaran yang diinginkan dalam suatu berita. Struktur ini juga menunjukkan kecenderungan mengenai apa yang disampaikan dalam suatu berita adalah sebuah kebenaran. Ada beberapa elemen struktur retorik, yaitu:<sup>64</sup>

1. *Leksikon*, pemilihan dan pemakaian kata tertentu untuk menandai atau menggambarkan peristiwa. Suatu fakta pada umumnya terdiri atas beberapa kata yang merujuk pada fakta. Pilihan kata yang dipakai tidak semata digunakan dengan apa adanya, tetapi secara ideologis menunjukkan pemaknaan seseorang terhadap fakta/realitas. Pemakaian kata seringkali diiringi dengan penggunaan label-label tertentu. Pemilihan kata yang dipakai menunjukkan sikap dan ideologi tertentu.
2. *Grafis*, biasanya dalam pemakaian huruf tebal, huruf miring, pemakaian garis bawah, huruf yang dibuat dengan ukuran yang lebih besar. Termasuk pemakaian *caption*, *raster*, grafik, gambar, tabel untuk mendukung pentingnya suatu pesan atau gagasan yang ingin ditonjolkan.

---

<sup>64</sup>Eriyanto, *Analisis Framing*, hlm 264-266

3. Metafora, penyampaian pesan menggunakan kata-kata kiasan maupun ungkapan. Disini metafora dimaksudkan sebagai ornament atau bumbu dari suatu berita. Penggunaan peribahasa, pepatah, ungkapan sehari-hari, bahalan ungkapan yang diambil dari ayat-ayat suci yang semuanya dipakai untuk memperkuat pesan utama.

#### 4. Analisis *Framing* Robert N. Entman

Dari definisi *framing* Robert N. Entman mengatakan “*Framing* merupakan suatu pendekatan untuk mengetahui bagaimana perspektif atau cara pandang yang digunakan oleh wartawan ketika menyeleksi isu dan menulis berita”. Entman melihat *framing* melalui dua dimensi besar yaitu, seleksi isu dan penekanan atau penonjolan aspek-aspek tertentu dari sebuah realitas ataupun isu. Entman melihat *framing* melalui dua dimensi besar yaitu, seleksi isu dan penekanan atau penonjolan aspek-aspek tertentu dari sebuah realitas ataupun isu.<sup>65</sup>

**Tabel 4.0 Teori *Framing* Robert N. Entman**

Pendefinisian Masalah (Define Problems)	Elemen ini merupakan frame/bingkai utama dari Entman. Ia menekankan bagaimana wartawan memahami suatu peristiwa. Ia juga menegaskan bahwa suatu peristiwa yang sama dapat dipahami secara berbeda.
Memperkirakan Penyebab Masalah (Diagnose Causes)	Elemen merupakan <i>framing</i> untuk membingkai siapa yang dianggap sebagai aktor dari suatu peristiwa. Dalam hal ini, penyebab bisa berarti apa (what), dan siapa (who). Suatu peristiwa dapat dipahami tentu saja dengan menentukan apa dan siapa yang dianggap sebagai sumber suatu masalah. Oleh karena itu, masalah yang dipahami

<sup>65</sup> Rachmat Kriyantono, *Teknik Praktis Riset Komunikasi*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2009), hlm, 255

	secara berbeda, penyebab masalah secara tidak langsung akan dipahami secara berbeda pula.
Membuat Pilihan Moral (Make Moral Judgment)	Elemen ini digunakan untuk membenarkan/memberi argumentasi terhadap pendefinisian masalah yang dibuat. Gagasan yang dikutip berhubungan dengan sesuatu yang familiar dan dikenal oleh masyarakat.
Menekankan Penyelesaian (Treatment Recommendation)	Elemen ini dipakai untuk menilai apa yang dikehendaki oleh wartawan, jalan apa yang dipilih untuk menyelesaikan masalah

### 5. Analisis *Framing* Tood Gitlin

Strategi bagaimana realitas/dunia dibentuk dan disederhanakan sedemikian rupa untuk ditampilkan kepada khalayak pembaca. Peristiwa-peristiwa ditampilkan dalam pemberitaan agar tampak menonjol dan menarik perhatian khalayak pembaca. Itu dilakukan dengan seleksi, pengulangan, penekanan, dan presentasi aspek tertentu dari realitas.<sup>66</sup>

### 6. Analisis *Framing* Amy Binder

Skema interpretasi yang digunakan oleh individu untuk menempatkan, menafsirkan, mengidentifikasi, dan melabeli peristiwa secara langsung atau tidak langsung. Frame mengorganisir peristiwa yang kompleks ke dalam bentuk dan pola yang mudah dipahami dan membantu individu untuk mengerti makna peristiwa.<sup>67</sup>

Dari beberapa definisi para ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa, analisis *framing* merupakan salah satu metode yang digunakan dalam penelitian untuk meneliti bagaimana satu atau lebih media membingkai atau

<sup>66</sup> Eriyanto, *Analisis Framing*, hlm. 67

<sup>67</sup> Eriyanto, *Analisis Framing*. hlm 68

mengkonsep sebuah isu atau peristiwa yang nantinya akan ditulis sebagai sebuah berita, lalu dipublikasikan melalui media massa, sehingga berita yang ditulis menimbulkan suatu efek yang nantinya akan mengembangkan opini public.



## BAB III

### METODELOGI PENELITIAN

Metode penelitian merupakan sebuah pengetahuan keterampilan. Artinya sebagai pengetahuan yang dapat dipelajari atau dibaca dari buku-buku dan memang memberikan pengetahuan bagi yang mempelajarinya. Akan tetapi dengan pengetahuan saja masih belum merupakan jaminan bagi yang bersangkutan untuk mempergunakan dan menerapkannya dalam suatu kegiatan penelitian. Penguasaan praktik lebih banyak ditentukan oleh pengalamannya meneliti dan latihan dalam menggunakan metode-metode yang telah di ketahuinya.<sup>68</sup>

#### A. JENIS DAN PENDEKATAN PENELITIAN

Pada penelitian ini peneliti memilih metode kualitatif dengan *framing* sebagai pendekatan analisis. Pendekatan penelitian ini menggunakan analisis Zhongdan Pan dan Gerald M. Kosicki. Metode tersebut dianggap peneliti mampu mengulas bagaimana cara sebuah media mbingkai pesan yang terkandung dalam sebuah berita yang diterbitkannya.

Menurut Bogdan dan Taylor, metode kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku orang yang diamati. Dengan kata lain, pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu secara utuh. Dengan demikian, tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi kedalam variable atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagian dari keutuhan.<sup>69</sup>

Penelitian menurut jenis data dan analisis yang kita tau itu ada dua yaitu penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif.

1. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan data kualitatif (data yang berbentuk kalimat, skema, dan gambar)

---

<sup>68</sup> Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Suatu pemikiran dan Penerapan* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1990), hlm. 38

<sup>69</sup> Lexi J Moeleong. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009).h. 4

2. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang menggunakan data kualitatif (data yang berbentuk angka atau grafik)

## **B. SUBJEK DAN OBJEK PENELITIAN**

### **1. Subjek Penelitian**

Subjek penelitian menurut Suharsimi Arikunto, memberi batasan subjek penelitian sebagai benda, hal atau orang tempat data untuk variabel penelitian melekat, dan yang di permasalahkan.<sup>70</sup> Dalam sebuah penelitian, subjek penelitian mempunyai peran yang sangat strategis karena pada subjek penelitian, itulah data tentang variabel yang penelitian amati.

Pada penelitian kualitatif subjek penelitian disebut dengan istilah informan, yaitu orang yang memberi informasi tentang data yang diinginkan peneliti berkaitan dengan penelitian yang sedang dilaksanakan. Adapun subjek penelitian dalam penelitian ini adalah media *online* kompas.com dan republic.c.id.

### **2. Objek Penelitian**

Objek penelitian adalah himpunan elemen yang dapat berupa orang, organisasi atau barang yang akan diteliti atau pokok persoalan yang hendak diteliti untuk mendapatkan data secara lebih terarah.<sup>71</sup> Adapun objek dalam penelitian ini yaitu berita tentang rancangan undang-undang Haluan Ideologi Pancasila.

## **C. TEHNIK PENGUMPULAN DATA**

Adapun sumber data dalam penelitian mencakup data primer dan skunder.

### **1. Sumber Primer**

Sumber data primer merupakan sumber data yang langsung memiliki wewenang dan tanggung jawab terhadap pengumpulan data. Sumber semacam ini disebut juga *first hand sources of information* atau sumber

---

<sup>70</sup> Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2016).hal. 26

<sup>71</sup> J. Supranto M. A. *Statistik Teori dan Aplikasi* Jilid 1, Edisi Keenem. (Jakarta: Erlangga.2000).hal 21

utama.<sup>72</sup> Adapun yang menjadi sumber utama yakni berita dari media media Kompas.com dan Republika *Online*.

## 2. Sumber Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber yang diperoleh bukan dari sumber yang pertama, yaitu informasi yang secara tidak langsung mempunyai wewenang dan tanggung jawab terhadap informasi yang ada padanya.<sup>73</sup> Sumber informasi yang diperoleh bukan sumber yang pertama atau sumber yang dimiliki data dan ia sendiri memperoleh data dari pihak atau orang lain, baik dalam bentuk tulisan, salinan, turunan ataupun sumber data yang dimiliki oleh bukan orang yang pertama. Misalnya dari kompas.com dan republika.co.id, jurnal-jurnal tentang media massa, surat kabar, artikel dan buku-buku tentang analisis *framing* tentang pemberitaan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila.

## D. ANALISIS DATA

Metode analisis data dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Metode kualitatif adalah suatu pernyataan sistematis yang berkaitan dengan seperangkat proposisi yang berasal dari data dan diuji kembali secara empiris.<sup>74</sup> Untuk menganalisis berbagai data yang diperoleh dari sumber penelusuran pustaka, maka analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif yang bersifat kualitatif. Dengan menggunakan data yang ada, penulis akan mendeskripsikan tentang bagaimana media *online* kompas.com dan republic.co.id mengemas berita tentang Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila.

---

<sup>72</sup> Muhammad Ali, *Strategi Penelitian Pendidikan* (Bandung: Angkasa, 1987), hlm. 42

<sup>73</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabet, 2009), hlm. 329

<sup>74</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2001), hlm. 8.

## BAB IV PENYAJIAN HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS BERITA

### A. GAMBARAN UMUM MEDIA

#### 1. MEDIA KOMPAS.COM

##### a. Sejarah Kompas.com

*Kompas.com* merupakan salah satu pionir media *online* di Indonesia *kompas.com* pertama kali menerbitkan berita di Internet pada 14 September 1995 dengan nama *Kompas Online*. Mulanya, *Kompas Online* atau KOL yang diakses dengan alamat *kompas.co.id* hanya menampilkan replika dari berita-berita harian *Kompas* yang terbit hari itu.<sup>75</sup>

Tujuan didirikan *kompas online* adalah untuk memberikan layanan kepada para pembaca harian *Kompas* di tempat-tempat yang sulit dijangkau oleh jaringan distribusi *Kompas*. Dengan hadirnya *Kompas Online*, para pembaca harian *Kompas* terutama di Indonesia bagian timur dan di luar negeri dapat menikmati sajian berita yang di terbitkan harian *Kompas* pada hari yang sama saat berita di unggah, pembaca tidak perlu menunggu beberapa hari seperti biasanya untuk membaca berita.<sup>76</sup>

Selanjutnya, demi memberikan layanan yang maksimal, di awal tahun 1996 alamat *Kompas Online* berubah menjadi *www.kompas.com*. Dengan alamat baru, *Kompas Online* menjadi semakin populer buat para pembaca setia harian *Kompas* di luar negeri.<sup>77</sup>

*Kompas.com* telah resmi berdiri pada tahun 1997 dengan nama *kompas online*. Saat itu, *kompas online* hanya berperan sebagai edisi internet dari harian *kompas*.<sup>78</sup> PT Kompas Media Nusantara sebagai perusahaan yang menaungi harian *kompas*. Namun seiring dengan menjamurnya pengiklan di situs daring, *Kompas Online* akhirnya dilepas dari redaksi harian *Kompas*, ditandai dengan pembentukan PT Kompas Cyber Media pada 6 Agustus 1998. Kehadiran KCM memberi peluang lebih leluasa bagi pengasuhnya untuk mengeksploitasi teknologi internet. Sementara itu, harian *Kompas* tetap berada di bawah PT Kompas Media Nusantara.<sup>79</sup> Sejak saat itu, *Kompas Online* lebih dikenal dengan sebutan

---

<sup>75</sup> Agung, Eko. *Wacana Moderasi Beragama Di Media Online (Analisis Wacana Model Van Dijk Di Media Kompas.Com Dan Republika Online)*. Skripsi S1 Program Studi Komunikasi Dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah. Istitut Agama Islam Negri Purwokerto, 2020. Hal 57

<sup>76</sup> Agung, Eko. *Wacana Moderasi*. Hal 57

<sup>77</sup> Agung, Eko. *Wacana Moderasi*. Hal 57-58

<sup>78</sup> Wulandari, Nur Aisyah. *Analisis framing*. hal 33

<sup>79</sup> Alfyya Dhiya Haq, Efi Fadilah, *Transformasi Harian Kompas Menjadi Portal Berita Digita Subscription Kompas.Id*, jurnal Fakultas Ilmu Komunikasi. Volume 01 Nomor 02(Universitas Padjadjaran, 2018)

KCM. Di era ini, para pengunjung KCM tidak lagi hanya mendapatkan replika harian *Kompas*, tapi juga mendapatkan *update* perkembangan berita-berita terbaru yang terjadi sepanjang hari.<sup>80</sup>

Pengunjung KCM meningkat pesat seiring dengan tumbuhnya pengguna Internet di Indonesia. Mengakses informasi dari Internet kini telah menjadi bagian tak terpisahkan dari hidup kita sehari-hari. Dunia digital pun terus berubah dari waktu ke waktu. KCM pun berbenah diri.<sup>81</sup>

Sepuluh tahun kemudian, pada tahun 2008 Kompas.com tampil dengan perubahan yang signifikan. Mengusung ide “Reborn”, Kompas.com membawa logo, tata letak, hingga konsep baru di dalamnya. Lebih kaya, lebih segar, lebih elegan dan tentunya tetap mengedepankan unsur *user friendly* dan *advertiser friendly*.<sup>82</sup>

Sinergi ini menjadikan Kompas.com sebagai sumber informasi lengkap, yang tidak hanya menghadirkan berita dalam bentuk teks, namun juga gambar, video, live streaming. Pertumbuhan ini pun mendorong bertambahnya pengunjung aktif kompas.com di awal tahun 2008 yang mencapai 20 juta pembaca aktif perbulan, dan total 40 juta page *view/impression* per bulan. Saat ini, kompas.com telah mencapai 120 juta page *view* perbulan.<sup>83</sup>

## **b. Visi dan Misi Kompas.com**

Sebagai salah satu media di Indonesia, Kompas memiliki motto “Amanat Hati Nurani Rakyat”. Kompas sendiri adalah “menjadi institusi yang memberikan pencerahan bagi perkembangan masyarakat Indonesia yang demokratis dan bermartabat. Serta menjunjung tinggi asas dan nilai kemanusiaan”. Kompas merupakan media pers yang mana memiliki visi dan misi.

- **Visi Kompas**

Menjadi perusahaan terbesar, terbaik, terpadu, dan tersebar di Asia Tenggara. Melalui usaha berbasis pengetahuan untuk menciptakan masyarakat terdidik, tercerahkan, menghargai kebhinekaan, adil, dan sejahtera.<sup>84</sup>

---

<sup>80</sup> Agung, Eko. *Wacana Moderasi*. Hal 58

<sup>81</sup> Agung, Eko. *Wacana Moderasi*. Hal 58

<sup>82</sup> Wulandari, Nur Aisyah. *Analisis framing*. hal 33

<sup>83</sup> Wulandari, Nur Aisyah. *Analisis framing*. hal 33

<sup>84</sup> Wulandari, Nur Aisyah. *Analisis framing*. hal 34

- **Misi Kompas**

Kompas mempunyai misi berita-beritanya dapat mencerahkan dan menambah pengetahuan pembaca.<sup>85</sup>

Mengantisipasi dan merespon dinamika masyarakat secara profesional, sekaligus memberi arah perubahan (trend setter) dengan menyediakan dan menyebarkan informasi yang terpercaya (Kompas Company Profile, 2007).

Dilihat dari mottonya yaitu Amanat Hati Nurani Rakyat, yang berarti bahwa Kompas menunjukkan keberpihakannya terhadap rakyat dalam arti mementingkan kepentingan orang banyak. Dari motto yang dimiliki dapat disimpulkan bahwa Kompas mengembangkan misi dalam pemberitaannya yang mengarah pada kepentingan umum dan bukan pada kepentingan individu atau golongan (Kompas Company Profile, 2007).

Kompas berperan serta ikut mencerdaskan bangsa, menjadi nomor satu diantara media pers yang lainnya. Dalam setiap pemberitaannya, Kompas menempatkan kemanusiaan sebagai nilai tertinggi, mengarahkan focus perhatian dan tujuan pada nilai-nilai transenden atau mengatasi kepentingan kelompok, dengan rumusan bakunya adalah “humanisme transendental”.<sup>86</sup>

Secara umum Kompas menyatakan diri sebagai surat kabar yang independen dan mencoba lebih obyektif dalam setiap pemberitaannya. Kompas menyebut dirinya merupakan penengah dari berbagai aliran politik yang ada dalam masyarakat.<sup>87</sup>

### c. Logo dan Tagline Kompas.com

#### 1. Logo Kompas.com

Dalam era pasar bebas seperti saat ini, persaingan dalam dunia usaha dan bisnis menjadi kian ketat, baik itu persaingan dalam bidang

---

<sup>85</sup> Alfiyya Dhiya Haq, Efi Fadilah, *Transformasi Harian Kompas*. Hal 198

<sup>86</sup> Hamad, Ibnu. *Konstruksi Realitas Politik dalam Medai Massa*. (Jakarta : Granit. 2004) hal. 116

<sup>87</sup> Nugroho Bimo, dkk. *Politik Media Mengemas Berita*. (Jakarta: ISAI. 1999).hal. 221

industri jasa maupun produk seiring dengan berkembangnya kemajuan teknologi. Menghadapi persaingan tersebut, setiap perusahaan memiliki strategi masing-masing agar dapat unggul dari para pesaingnya. Salah satu strategi yang mulai marak dilakukan oleh perusahaan adalah dengan cara merubah logo pada perusahaannya.

Logo dapat diartikan sebagai suatu identitas atau merek yang mengkomunikasikan secara luas tentang produk, pelayanan dan organisasi dengan cepat. Logo tidak sekedar menjadi sebuah label untuk perusahaan, tetapi juga merupakan sebuah pesan kualitas dan semangat produk lewat pemasaran, periklanan dan kinerja produk.<sup>88</sup> Kompas juga menggunakan logo agar lebih mudah untuk dikenali masyarakat.

Kompas.com mengambil simbol 2 (dua) segitiga yang tumpang tindih sebagai bentuk representasi panah penunjuk arah yang sejalan dengan value Kompas.com sebagai pedoman berita bagi pembacanya. Perbedaan sudut rotasi di antara kedua segitiga diartikan sebagai kebebasan dalam memilih pandangan dan pendapat bagi pembacanya. Sementara, 3 (tiga) warna dasar dan masing-masing turunannya dimaksudkan untuk menggambarkan beragamnya individu pembaca Kompas.com<sup>89</sup>

IAIN PURWOKERTO

---

<sup>88</sup> Urfan Pratama, Muhammad. *Analisis Semiotika Pemaknaan Logo Baru Pt Gramedia Asri Media* (Gramedia). Skripsi S1 Program Studi Ilmu Komunikasi. Jakarta. 2017. Hal 32

<sup>89</sup> Araliya Aprianti Ode, Canggih. *Kredibilitas Pemberitaan Pada Portal Berita Online Kompas.Com (Suatu Studi Analisis Isi)*. Skripsi S1 Fakultas Dakwah Dan Komunikasi. Uin Alauddin Makassar. 2014 hal. 70

**Gambar 1 Logo Kompas.com**



Logo type pada “Kompas.com”, merupakan perpaduan dari dua unsur, yaitu tulisan “Kompas” yang menjadi simbol historis serta merupakan bagian dari grup Kompas Gramedia dan “com” yang merupakan identitas bisnis perusahaan sekaligus alamat URL dari portal berita digital ini.<sup>90</sup>

## 2. Tagline Kompas.com

Dengan tagline Jernih Melihat Dunia, Kompas.com ingin memosisikan diri sebagai media yang selalu menyajikan informasi dalam perspektif yang objektif, utuh, independent, tidak bias oleh berbagai kepentingan politik, ekonomi dan kekuasaan.<sup>91</sup>

Karena itu, Kompas.com tidak hanya menyajikan informasi terkini dalam bentuk berita hardnews yang update mengikuti naiknya media *online*, tetapi juga berita utuh dalam berbagai perspektif untuk menjelaskan duduknya perkara sebuah persoalan yang kerap simpang siur.<sup>92</sup>

### **d. Produk Kompas**

Berikut merupakan produk yang dibuat Kompas untuk para patnernya: <sup>93</sup>

<sup>90</sup> Araliya Aprianti Ode, *Canggi. KREDIBILITAS PEMBERITAAN*. Hal. 70

<sup>91</sup> Profil Kompas <https://inside.kompas.com/about-us> di akses pada 7 oktober 2020

<sup>92</sup> Profil Kompas <https://inside.kompas.com/about-us> di akses pada 7 oktober 2020

<sup>93</sup> Profil Kompas <https://inside.kompas.com/about-us> di akses pada 7 oktober 2020

1. Brandzview

Produk advertisement bersifat softselling dan edukatif yang digarap menggunakan standar jurnalistik dan gaya bahasa Kompas.com.

2. Advertorial

Produk advertisement bersifat hardselling yang digarap menggunakan standar jurnalistik dan gaya bahasa Kompas.com untuk mendorong promosi brand, produk atau jasa.

3. Kilas

Produk turunan Brandzview untuk memperkenalkan potensi pemerintah daerah, kementerian, dan instansi BUMN.

4. Jixie

Jixie menawarkan pilihan berita yang disesuaikan dengan minat dan ketertarikan pembaca.

5. Sorot

Sorot merupakan produk turunan dari content marketing untuk mendorong potensi bisnis produk dan jasa dari bermacam sektor industri.

**e. Struktur Media Kompas.com**

Struktur Redaksi Kompas.com<sup>94</sup>

**Pimpinan Redaksi** : Wisnu Nugroho

**Managing Editor** : Amir Sodikin, Johannes Heru Margianto

**Assistant Managing Editor** : Laksono Hari Wiwoho, Ana Shofiana Syatiri, Caroline Sondang Andhikayani Damanik

**Editors** : Bayu Galih Wibisono, Diamanty Meiliana, Krisiandi, Fabian Januarius Kuwado, Icha Rastika, Kristian Erdianto, Dani Prabowo, Sabrina Asril, Sandro Gatra, Egidius Patnistik, Jessi Carina, Irfan

---

<sup>94</sup> Profil Kompas <https://inside.kompas.com/about-us> di akses pada 7 oktober 2020

Maullana, Ambaranie Nadia Kemala Movanita, Nursita Sari, Farid Assifa, Aprillia Ika, Robertus Belarminus, Abba Gabrillin, Erlangga Djumena, Bambang Priyo Jatmiko, Sakina Rakhma Diah Setiawan, Yoga Sukmana, Hilda Hastuti, Kurnia Sari Aziza, Dian Maharani, Kistyarini, Andi Muttya Keteng, Tri Susanto Setyawan, Aris Fertony Harvenda, Agung Kurniawan, Azwar Ferdian, Aditya Maulana, Agustinus Wisnubrata, Glori Kyrious Wadrianto, Lusia Kus Anna Maryati, Bestari Kumala Dewi, Muhammad Reza Wahyudi, Reska Koko Nistanto, Oik Yusuf Araya, Gito Yudha Pratomo, Kahfi Dirga Cahya, Silvita Agmasari, Aloysius Gonsaga Angi Ebo, Eris Eka Jaya, Ferril Dennys Sitorus, Nugyasa Laksamana, Shierine Wangsa Wibawa, Sri Anindiati Nursastri, Wahyu Adityo Prodjo, Palupi Annisa Auliani, Erwin Kusuma Oloan Hutapea, Yunanto Wiji Utomo, Nibras Nada Nailufar, Ardi Priyatno Utomo, Michael Hangga Wismabrata, Gloria Setyvani Putri K., Inggried Dwi Wedhaswari, Resa Eka Ayu Sartika, Ariska Puspita Anggraini, Tri Indriawati

**Repoters** :Ihsanuddin, Rakhmat Nur Hakim, Ardito Ramadhan, Akhdi Martin Pratama, Rosiana Haryanti, Ira Gita Natalia Sembiring, Setyo Adi Nugroho, Stanly Ravel Pattiwaelapia, Nabilla Tashandra, Dian Reinis Kumampung, Wahyunanda Kusuma Pertiwi, Josephus Primus, Alsadadrudi, Mela Arnani, Luthfia Ayu Azanella, Retia Katika Dewi, Akbar Bhayu Tamtomo

**Multimedia & Social Media** :Roderick Adrian Mozes, Heribertus Kristianto Purnomo, Dino Oktaviano Sami Putra, Ari Prasetyo, Garry Andrew Lotulung, Andreas Lukas, Lulu Cinantya, Sherly Puspita, Pamela Djajasaputra

**Administrative & Secretary** :Adinda Dwi Putri, Yuliana Melati P., Ira Fauziah

**Content Martketing** :Alia Deviani, Fikria Hidayat, Sri Noviyanti, Mikhael Gewati, Sheila Respati, Anggara Wikan Prasetya, Hisnudita Hagiworo, Alek Kurniawan, Anissa Dea Widiarini, Aditya Mulyawan

## 2. MEDIA REPUBLIKA *ONLINE*

### a. Sejarah Republika *Online*

Republika merupakan koran nasional yang didirikan oleh kalangan komunitas muslim di Indonesia. Repblika terbit pertama kali pada 4 januari 1993. Terbitnya republika dikalangan masnyarakat diperoleh atas upaya Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) yang berhasil menembus peraturan ketat pemerintah untuk izin penerbitan pada saat itu.<sup>95</sup>

Keberhasilan Republika sampai saat ini, merupakan upaya keras manajemen dan seluruh staf dan para karyawan PT Abadi Bangsa Tbk sejak than 1993. Dengan semua keberhasilan tersebut, Republika tidak berhenti sampai pada surat kabar saja, melainkan, republika mulai menyajikan layanan berita disitus *web internet*, dengan alamat *www.republika.co.id*.<sup>96</sup>

Republika *Online* (ROL) hadir sejak 17 Agustus 1995, dua tahun setelah Harian Republika terbit. ROL merupakan portal berita yang menyajikan informasi secara teks, audio, dan video, yang terbentuk berdasarkan teknologi hipermedia dan hiperteks.<sup>97</sup>

Dengan kemajuan informasi dan perkembangan sosial media, ROL kini hadir dengan berbagai fitur baru yang merupakan percampuran komunikasi media digital. Informasi yang disampaikan diperbarui secara berkelanjutan yang terangkum dalam sejumlah kanal, menjadikannya sebuah portal berita yang bisa dipercaya.<sup>98</sup>

Kemajuan perkembangan tehnologi membuat kebuthan akan informasi menjadi hal utama bagi masyarakat. Informasi yang dicari tak terbatas hanya

---

<sup>95</sup> Lindawati. *Analisis Framing Pemberitaan Label Halal Dalam Undang-Undang Pangan di Republika Online*. Skripsi S1 jurusan komunikasi dan penyiaran islam. Fakultas Ilmu Komunikasi Dan Ilmu Dakwah Syarif Hidayatullah Jakarta, (2013). Hal. 47

<sup>96</sup> Lindawati. *Analisis Framing*. hal 47

<sup>97</sup> Profil Republika <https://www.republika.co.id/page/about> diakses pada 7 oktober 2020

<sup>98</sup> Profil Republika <https://www.republika.co.id/page/about> diakses pada 7 oktober 2020

dari media cetak, oleh karena itu dengan adanya ROL dalam masyarakat ibarat oasis bagi mereka yang haus akan informasi.

Tujuan utama penerbitan Republik *Online* adalah memberi pelayanan kepada pembaca yang tidak terjangkau dengan mendistribusikan koran cetak. Dengan kemajuan informasi dan perkembangan social media, Republika *Online* kini hadir dengan berbagai fitur baru yang merupakan percampuran komunikasi media digital. Informasi yang disampaikan diperbaharui secara berkelanjutan yang terkumpul dalam sejumlah rubrik, menjadikannya sebuah portal berita yang bisa dipercaya. dan Republika *Online* hadir dalam versi berbahasa inggris.<sup>99</sup>

Sesuai dengan falsafah dasar Republika, muatan Republika *online* tetap mengutamakan Komunitas Muslim sebagai basis pengunjunnya. Oleh karena itu, Republika *online* lebih mengangkat *conten-conten* bermuatan islam. Dengan ideologi tersebut Republika *online* menjadi media *online* yang berbasis khas keislaman. Segala kreativitas republika *online* selalu dekat dan melayani keinginan masyarakat.<sup>100</sup>

#### **b. Visi dan Misi Republika *Online***

Sesuai dengan falsafah dasar Republika, muatan Republika *Online* tetap mengutamakan komunitas muslim sebagai basis pengunjunnya. Oleh karena itu Republika *Online* lebih mengangkat *conten - conten* bermuatan islam. Sedang sebagai media pers, Republika juga memiliki visi dan misinya sendiri yakni:

- **Visi Republika *Online***

Menjadi harian umum Republika sebagai koran umat yang terpercaya dan mengutamakan nilai-nilai universal, toleran, damai, cerdas dan professional, namun mempunyai prinsip dalam keterlibatannya

---

<sup>99</sup> Profil Republika <https://www.republika.co.id/page/about> diakses pada 7 oktober 2020

<sup>100</sup> Lindawati. Analisis *framing*. hal 48

menjaga persatuan bangsa dan kepentingan umat islam yang berdasarkan pemahaman rahmatan lil alamin.<sup>101</sup>

- **Misi Republika Online**

Percerdasan bangsa melalui pendalaman wawasan yang berbasis komunitas melalui pemberitaan yang akurat, aktual, terpercaya, edukatif, serta membela keadilan dan kebenaran. Selain itu, republika berusaha meningkatkan dan menguatkan prestasi dan dedikasi individu menjadi sebuah team sebagai kunci perkembangan perusahaan dan peningkatan kesejahteraan.<sup>102</sup>

**c. Logo dan Tagline Republika Online**

Sebagai salah satu perusahaan media yang bergerak dalam bidang pers. Republika juga menggunakan logo untuk mengenalkan perusahaannya. Logo yang dimiliki republika merupakan nama harian “Republika” dan “co.id” yang merupakan nama perusahaan sekaligus alamat URL situs koran Republika Online dimuat. Republika Online dengan alamat [www.republika.co.id](http://www.republika.co.id) terus melakukan pembenahan. Mempunyai tagline “Jendela Umat”.<sup>103</sup>

**Gambar 2 Logo Republika.co.id**



**d. Produk Republika**

Sebagai perusahaan pers, Republika juga membuat produk, yakni:<sup>104</sup>

1. Portal internet multimedia yang menampilkan konten dalam format teks, voice, visual, dan mendistribusikan konten secara *online*, mobile, dan print.

---

<sup>101</sup> Lindawati. *Analisis framing*. hlm 48

<sup>102</sup> Ibnu Hamad, *Konstruksi Realitas Politik dalam Media Massa* (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 122.

<sup>103</sup> Ina Salmah Febriani, “*Analisis Deskriptif Manajemen Redaksi pada Republika Online*”, Skripsi, (Fakultas Ilmu Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010), hlm 41

<sup>104</sup> Lindawati. *Analisis framing*. hlm. 49

2. Media interaktif komunitas muslim untuk membangun partisipasi dan kesadaran umat terhadap pluralism informasi berkwalitas.
3. Focus pada pengembangan conten berbasis keislaman.
4. Memberi ruang informasi sangat luas dan cepat.
5. Melayani segmen audience dengan rentang usia 18-50 tahun.

Kanal-kanal republika.co.id. memiliki tema yang berbeda-beda. Total ada 11 kanal yang ditampilkan oleh Republika.co.id.

1. Khazanah : Memuat berita seputar dunia Islam.
  2. Sepakbola : Memuat berita seputar pertandingan sepakbola, update skor dan informasi seputar tim sepakbola.
  3. Oto-Tek : Memuat berita seputar kendaraan terbaru, tipstips merawat kendaraan serta mereview kendaraan baru.
  4. Jurnal Haji : Memuat berita seputar informasi haji.
  5. Leisure : Memuat berita seputar gaya hidup dan wisata halal.
  6. Inpicture : Memuat foto-foto berita berkualitas dalam resolusi tinggi.
  7. Video : Memuat video-video tentang berita terhangat, musik dan bincang-bincang.
  8. Publikasi : Memuat berita yang ditulis oleh khalayak (citizen journalism).
  9. Ekonomi : Memuat berita tentang ekonomi.
  10. English : Memuat semua berita dalam bahasa Inggris.
- Selarung : Memuat berita dalam sudut pandang islam dan cerita Islam

#### e. Struktur Media Republika

<b>Pimpinan Redaksi</b>	: Irfan Junaidi
<b>Wakil Pemimpin Redaksi</b>	: Nur Hasan Murtaji
<b>Redaktr Pelaksana ROL</b>	: Elba Damhuri
<b>Wakil Redaktur Pelaksana ROL</b>	: Joko Sadewo
<b>Asisten Redaktur Pelaksana ROL</b>	: Didi Purwadi, Muhammad Subarkah, Budi raharjo

**Tim Redaksi** : Agung Sasongko, Bayu Hermawan, Esthi Maharani, Indira Rezkisari, Israr Itah, Yudha Manggala Putra, Dwi Murdaningsih, Nidia Zuraya, Nur Aini, Teguh Firmansyah, Andi Nur Aminah, Karta Raharja Ucu, Andri Saubani, Reiny Dwinanda, Ratna Puspita, Endro Yuwanto, Nashih Nasrullah, Friska Yolanda, Gita Amanda, Ani Nursalikhah, Hasanul Risqa, Christiyaningsih, Havid Al Vizki, Wisnu Aji Prasetyo, Fakhtar Khairon Lubis, Fian Firatmaja, Surya Dinata Irawan

**Tim Sosmed** : Fanny Damayanti, Asti Yulia Sundari, Dian Alfiah, Ammar Said

**Tim IT dan Desain** : Mohamad Afif, Abdul Gadir, Nandra Maulana Irawan, Mardiah, Kurnia Fakhri, Mariz

**Kepala Sport GA** : Slamet Riyanto

**Tim Sport** : Riky Romadon, Firmansyah, Abidin, Nurudin Toto Rahedi, Haryadi

**Sekred** : Erna Indriyanti

## B. FRAMING BERITA MODEL ZHONGDANG PAN DAN KOSICKI

### 1. Teks Berita

- a. Berita dari Kompas.com

**Judul Berita :**

**MUI: RUU HIP Bertentangan dan Mengancam Eksistensi Pancasila**

**Gambar 3.1 Teks Berita Kompas 26 Agustus 2020**

Penulis: **Sania Mashabi** | Editor: **Kristian Erdianto**

**JAKARTA, KOMPAS.com** - Majelis Ulama Indonesia (**MUI**) menilai Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (**RUU HIP**) bertentangan dan mengancam eksistensi Pancasila.

Pernyataan ini disampaikan oleh Sekretaris Jenderal MUI **Anwar Abbas** melalui keterangan tertulisnya, Rabu (26/8/2020).

"RUU HIP sangat bertentangan dan mengancam eksistensi Pancasila sehingga menimbulkan reaksi dan penolakan dari masyarakat luas," kata Anwar.

**Baca juga:** [Fahri Hamzah Nilai RUU HIP Akan Digugat jika Tetap Disahkan, Ini Alasannya](#)

### Gambar 3.2 Teks Berita Kompas 26 Agustus 2020

Oleh karena itu, Anwar berharap DPR segera menarik RUU tersebut dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2020.

Permintaan pencabutan tersebut sesuai dengan surat DP MUI Pusat kepada Pimpinan DPR RI Nomor: B-1291/DP MUI/VI/2020, tanggal 25 Juni 2020, perihal Penarikan dan Pencabutan RUU HIP.

"Kepada DPR untuk segera dan wajib menarik RUU HIP dari proses pembahasan dan mencabutnya dari Prolegnas," ujar dia.

**Baca juga: Menurut Baleg, RUU HIP Bisa Dicabut dari Prolegnas Prioritas Melalui Bamus**

#### b. Berita dari Republika *Online*

**Judul Berita: MUI Ingatkan DPR Segera Cabut RUU HIP dari Prolegnas**

Red: Andri Saubani

### Gambar 4.1 Teks Berita Republika *Online* 26 Agustus 2020

**MUI berpandangan RUU HIP tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila.**

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Majelis Ulama Indonesia (MUI) kembali mengingatkan penarikan pembahasan Rencana Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) setelah sempat ditunda beberapa kali. MUI meminta **DPR** segera mencabut **RUU HIP** dari program legislasi nasional (prolegnas).

"Dewan Pimpinan (DP)MUI Pusat mengingatkan kembali kepada DPR untuk segera dan wajib menarik RUU HIP dari proses pembahasan dan mencabutnya dari program legislasi nasional (prolegnas)," kata Wakil Ketua Umum **MUI** KH Muhyiddin Junaidi, MA kepada wartawan di Jakarta, Rabu (26/8).

Muhyiddin mengatakan, penarikan RUU HIP dari pembahasan prolegnas itu sebagaimana surat yang dilayangkan ke Pimpinan DPR RI Nomor: B-1291/DP MUI/VI/2020, tanggal 25 Juni 2020, perihal Penarikan dan Pencabutan RUU HIP.

Menurut Muhyiddin, MUI berpandangan RUU HIP tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan filosofi bernegara. RUU HIP ingin mengubah naskah Pancasila yang sudah hidup di tengah bangsa Indonesia.

### Gambar 4.2 Teks Berita Republika *Online* 26 Agustus 2020

Pancasila, kata dia, sudah disepakati sebagai konsensus nasional dan sudah menjiwai Piagam Jakarta sehingga sebaiknya tidak lagi diutak-atik demi tatanan Indonesia yang baik seperti saat ini.

"MUI berkeyakinan bahwa menempatkan/mendudukan Pancasila dalam peraturan organik (*instrumental norm*) sebagaimana dirumuskan dalam RUU HIP sejatinya merendahkan harkat dan martabat Pancasila itu sendiri dan mengkerdilkan nilai-nilai Pancasila sebagai falsafah bangsa dan negara ke dalam norma yang *rigid* dan sempit," katanya.

Dengan menempatkan Lima Sila dalam RUU HIP sebagai peraturan organik, kata dia, maka berakibat Pancasila tidak lagi dapat dijadikan sebagai sumber dari segala sumber hukum negara karena tidak mungkin UUD NKRI Tahun 1945 bersumber dari peraturan di bawahnya (RUU HIP). Dia mengatakan, Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum yang menjiwai dari peraturan perundang-undangan di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

"Oleh karena itu, posisi Pancasila merupakan landasan dasar yang mengandung nilai filosofis (*staatsfundamental norm*) dalam berbangsa dan bernegara," ujar Muhyiddin.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan alasan RUU HIP belum bisa langsung dicabut, meskipun sudah ada RUU Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). DPR belakangan memang menerima RUU BPIP dari pemerintah menyusul kontroversi RUU HIP.

Menurut Dasco, secara sepintas ada perbedaan mendasar antara RUU HIP dan BPIP. RUU HIP, kata Dasco, mengatur soal ideologi Pancasila.

"Sementara BPIP mengatur soal lembaga BPIP yang ada untuk memperkuat bagaimana mensosialisasikan Pancasila yang sudah final," kata Dasco menambahkan.

## 2. TEMUAN DATA

Berita yang dipakai sebagai unit analisis adalah berita di Kompas.com edisi 26 Agustus 2020 dengan judul "MUI: RUU HIP Bertentangan dan

Mengancam Eksistensi Pancasila” dan di Republik.co.id edisi 26 Agustus 2020 dengan judul “MUI Ingatkan DPR Segera Cabut RU HIP dari Prolegnas”

**a. Kompas.com 26 Agustus 2020**

Temuan peneliti adalah kompas.com menuliskan bahwa, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menilai Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) bertentangan dan mengancam eksistensi Pancasila. Selain itu Kompas.com menuliskan unsur why, bahwa “RUU HIP sangat bertentangan dan mengancam eksistensi pancasila sehingga menimbulkan penolakan dari masyarakat luas,”. Kompas.com juga menuliskan beberapa kata ganti kalimat DPR dengan untuk menuliskan sosok Supratman

**b. Republik.co.id 26 Agustus 2020**

Temuan peneliti adalah Republic.co.id menuliskan bahwa, MUI berpandangan RUU HIP tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan filosofi bernegara. RUU HIP ingin mengubah naskah Pancasila yang sudah hidup ditengah bangsa Indonesia. Republik.co.id juga menuliskan, dengan menempatkan Lima Sila dalam RUU HIP sebagai peraturan organik, kata dia, maka berakibat Pancasila tidak lagi dapat dijadikan sebagai sumber dari segala sumber hukum negara karena tidak mungkin UUD NKRI Tahun 1945 bersumber dari peraturan di bawahnya (RUU HIP). Dia mengatakan, Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum yang menjwai dari peraturan perundang-undangan di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Republic.co.id juga menuliskan beberapa kata ganti yaitu untuk menuliskan sosok Muhyiddin Junaidi yakni, Dewan Pimpinan (DP) MUI.

### 3. ANALISIS DAN INTERPRETASI

#### a. Kompas.com edisi 26 Agustus 2020

**Tabel 5.0 Analisis Berita Kompas.com edisi 26 Agustus 2020**

<b>Perangkat <i>Framing</i></b>	<b>Unit Pengamatan</b>	<b>Hasil Pengamatan</b>
<b>Struktur Sintaxis</b>	Judul	MUI: RUU HIP Bertentangan dan Mengancam Eksistensi Pancasila
	Lead	Majelis Ulama Indonesia (MUI) menilai Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) bertentangan dan mengancam eksistensi Pancasila.
	Latar Informasi	Penolakan RUU HIP
	Kutipan Sumber	Permintaan pencabutan tersebut sesuai dengan surat DP MUI Pusat kepada Pimpinan DPR RI Nomor: B-1291/DP MUI/VI/2020, tanggal 25 Juni 2020, perihal Penarikan dan Pencabutan RUU HIP.  "Ternyata pemerintah kirimkan surpres dan baru pertama kali terjadi juga dalam sejarah pembentukan RUU pemerintah kirimkan surpres, tapi juga sekaligus ajukan draf RUU yang baru," kata Supratman dalam diskusi bertajuk 'Habis RUU HIP, Terbitlah RUU BPIP?' secara virtual, Sabtu (18/7/2020).

	Pernyataan Opini	"Kepada DPR untuk segera dan wajib menarik RUU HIP dari proses pembahasan dan mencabutnya dari Prolegnas,"
	Penutup	penarikan RUU HIP yang masuk dalam prolegnas prioritas harus diputuskan dalam tingkat Badan Musyawarah.
<b>Struktur Skrip</b>	What	Anwar berharap DPR segera menarik RUU tersebut dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2020.
	Where	Jakarta
	When	Rabu, 26 Agustus 2020
	Who	Jendral MUI
	Why	“RUU HIP sangat bertentangan dan mengancam eksistensi pancasila sehingga menimbulkan penolakan dari masyarakat luas,”
	How	RUU Haluan Ideologi Pancasila tidak bisa serta merta dicabut dalam prolegnas prioritas tahun 2020, karena surat dan naskah akademik sudah dikirimkan DPR kepada pemerintah.
<b>Struktur Tematik</b>	Paragraf, proposisi, kalimat,	Paragraf awal berita berisi MUI menilai rancangan undang-undang

	hubungan antar kalimat	haluan ideologi Pancasila bertentangan dan mengancam eksistensi Pancasila.  Paragraf kedua, ketiga, dan keempat membahas tentang penolakan RUU HIP. Paragraf ke lima dan terakhir di tutup dengan keterangan penulis bahwa penarikan RUU HIP yang masuk dalam prolegnas prioritas harus diputuskan dalam tingkatan badan musyawarah.
<b>Struktur Retoris</b>	Kata, Idom, gambar/ foto, grafik	Bertentangan dan mengancam

### 1. Struktur Sintaxis

Dari struktur sintaxis, terlihat pemberitaan ini memberitahukan kepada masyarakat bahwa RUU HIP memang bertentangan dan mengancam eksistensi Pancasila sebagai dasar negara. Hal tersebut bisa dilihat dari susunan kata pada judul berita. Pada Lead berita diperjelas lagi hal yang serupa mengenai Majelis Ulama Indonesia (MUI) menilai Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) bertentangan dan mengancam eksistensi Pancasila. Latar informasi berita masih cukup jelas yaitu tentang penolakan RUU HIP.

### 2. Struktur Skrip

Dalam struktur skrip terlihat gambaran bahwa media kompas.com memberikan gambaran mengenai penolakan RUU HIP. Unsur What yang menginformasikan Anwar berharap DPR segera menarik RUU tersebut dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2020). Unsur Why menyajikan topik “RUU HIP sangat bertentangan dan

mengancam eksistensi pancasila sehingga menimbulkan penolakan dari masyarakat luas,”. Unsur How menerangkan bahwa RUU Haluan Ideologi Pancasila tidak bisa serta merta dicabut dalam prolegnas prioritas tahun 2020, karena surat dan naskah akademik sudah dikirimkan DPR kepada pemerintah.

### 3. Struktur Tematik

Dalam struktur tematik ini, paragraph demi paragraph dalam berita ini secara keseluruhan membahas RUU HIP yang ditolak karena di nilai bertentangan dan mengancam eksistensi Pancasila. Dijelaskan pula tentang penarikan RUU HIP yang masuk dalam prolegnas prioritas harus diputuskan dalam tingkatan badan musyawarah.

### 4. Struktur Retoris

Dari struktur retoris ini paragraph pertama menjelaskan tentang Majelis Ulama Indonesia (MUI) menilai Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) bertentangan dan mengancam eksistensi Pancasila. Di dalam paragraph tersebut terdapat kata “bertentangan dan mengancam” artinya terdapat upaya penulis menonjolkan atau menekankan pada penolakan MUI tentang RUU HIP.

### 5. Konsep Psikologis

Penolakan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila yang dituliskan secara negative oleh Kompas.com tidak lepas dari upaya Kompas.com untuk mewujudkan bahwa Rancangan Undang-Undang Pancasila akan mengancam eksistensi Pancasila sebagai dasar Negara Indonesia. Selain itu, penggunaan judul berita dengan menuliskan MUI: RUU HIP Bertentangan dan mengancam Eksistensi Pancasila merupakan judul yang cukup untuk menimbulkan sebuah opini yang negative tentang RUU HIP.

### 6. Konsep Sosiologi

Berita tentang penolakan RUU HIP diterbitkan oleh kompas.com di Jakarta pada tanggal 26 Agustus 2020. Berita ini

memuat tentang permintaan Sekretaris Jenderal MUI Anwar Abbas agar segera mencabut RUU HIP. Namun demikian RUU HIP tidak dapat serta merta dicabut. Pencabutan RUU HIP harus melalui prosedur yang sudah di atur dan di tetapkan oleh pemerintah.

#### 7. Kesimpulan Berita

Media kompas.com dalam membingkai berita Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila(HIP) membuat sebuah opini negative. Sehingga masyarakat yang membaca berita tersebut akan menilai, bahwasanya RUU HIP yang di tetapkan oleh DPR akan berdampak buruk pada eksistensi Pancasila sebagai dasar hukum NKRI. Hal ini ditunjukkan oleh dengan pernyataan Sekretaris Jenderal MUI Anwar Abbas melalui keterangan tertulisnya, Kompas, Rabu (26/8/2020).

*"RUU HIP sangat bertentangan dan mengancam eksistensi Pancasila sehingga menimbulkan reaksi dan penolakan dari masyarakat luas," kata Anwar.*

#### b. Republik.co.id edisi 26 Agustus 2020

**Tabel 6.0 Analisis Berita Republik.co.id edisi 26 Agustus 2020**

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan
Struktur Sintaksis	Judul	MUI Ingatkan DPR Segera Cabut RUU HIP dari Prolegnas
	Lead	Majelis Ulama Indonesia (MUI) kembali mengingatkan penarikan pembahasan Rencana Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) setelah sempat ditunda beberapa kali. MUI meminta DPR segera mencabut RUU HIP dari program legislasi nasional(prolegnas).

	Latar Informasi	MUI meminta DPR segera mencabut RUU HIP dari program legislasi nasional(prolegnas).
	Kutipan Sumber	<p>"Dewan Pimpinan (DP)MUI Pusat mengingatkan kembali kepada DPR untuk segera dan wajib menarik RUU HIP dari proses pembahasan dan mencabutnya dari program legislasi nasional (prolegnas),"kata Wakil Ketua Umum MUI KH Muhyiddin Junaidi, MA kepada wartawan di Jakarta, Rabu (26/8).</p> <p>Muhyiddin mengatakan, penarikan RUU HIP dari pembahasan prolegnas itu sebagaimana surat yang dilayangkan ke Pimpinan DPR RI Nomor: B-1291/DP MUI/VI/2020, tanggal 25 Juni 2020, perihal Penarikan dan Pencabutan RUU HIP.</p>
	Pernyataan Opini	<p>"MUI berkeyakinan bahwa menempatkan/mendudukan Pancasila dalam peraturan organik (instrumental norm) sebagaimana dirumuskan dalam RUU HIP sejatinya merendahkan harkat dan martabat Pancasila itu sendiri dan mengkerdikan nilai-nilai Pancasila sebagai falsafah bangsa dan negara ke dalam norma yang rigid dan sempit,"</p> <p>"Oleh karena itu, posisi Pancasila merupakan landasan dasar yang</p>

		mengandung nilai filosofis (staatsfundamental norm) dalam berbangsa dan bernegara," ujar Muhyiddin.
	Penutup	"Sementara BPIP mengatur soal lembaga BPIP yang ada untuk memperkuat bagaimana mensosialisasikan Pancasila yang sudah final," kata Dasco menambahkan.
<b>Struktur Skrip</b>	What	MUI meminta DPR segera mencabut RUU HIP dari program legislasi nasional(prolegnas).
	Where	Jakarta
	When	Rabu, 26 Agustus 2020
	Who	Wakil Ketua Umum MUI KH Muhyiddin Junaidi
	Why	Dengan menempatkan Lima Sila dalam RUU HIP sebagai peraturan organik, kata dia, maka berakibat Pancasila tidak lagi dapat dijadikan sebagai sumber dari segala sumber hukum negara karena tidak mungkin UUD NKRI Tahun 1945 bersumber dari peraturan di bawahnya (RUU HIP). Dia mengatakan, Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum yang menjiwai dari peraturan perundang-undangan di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

	How	Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan alasan RUU HIP belum bisa langsung dicabut, meskipun sudah ada RUU Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). DPR belakangan memang menerima RUU BPIP dari pemerintah menyusul kontroversi RUU HIP.
<b>Struktur Tematik</b>	Paragraf, proposisi, kalimat, hubungan antar kalimat	<p>Paragraf awal berita, kedua, dan ketiga berisi tentang Majelis Ulama Indonesia (MUI) kembali mengingatkan penarikan pembahasan Rencana Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP)</p> <p>Paragraph keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan membahas RUU HIP tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila.</p> <p>Paragraph kesembilan dan terakhir ditutup dengan keterangan penulis bahwa alasan RUU HIP belum bisa langsung dicabut, meskipun sudah ada RUU Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).</p>
<b>Struktur Retoris</b>	Kata, idiom, gambar/foto, grafik	Ingatkan

### 1. Struktur Sintaksis

Dilihat dari judul dan lead berita ini, terlihat keinginan penulis menekankan kata “ingatkan”. Kata tersebut dari pernyataan ketua umum MUI, KH Muhyiddin Junaidi, yang kemudian dijadikan judul dalam berita ini. Dimana didalam perkaannya kepada wartawan ia mengatakan

"Dewan Pimpinan (DP)MUI Pusat mengingatkan kembali kepada DPR untuk segera dan wajib menarik RUU HIP dari proses pembahasan dan mencabutnya dari program legislasi nasional (prolegnas)."

Selanjutnya kutipan sumber dalam berita ini menggunakan satu sumber yaitu KH Muhyiddin Junaidi selaku ketua umum MUI. Berita ini juga berisikan kutipan-kutipan dari sumber yang menjelaskan beberapa poin untuk mengingatkan DPR tentang pencabutan RUU HIP.

## 2. Struktur Skrip

Dari struktur skrip, dapat dilihat yang ingin dikisahkan penulis yaitu dalam unsur what, MUI meminta DPR segera mencabut RUU HIP dari program legislasi nasional(prolegnas). Unsur who wakil ketua umum MUI, KH Muhyiddin Junaidi. Serta unsur why, unsur ini jelas KH Muhyiddin Junaidi berpendapat bahwa, Dengan menempatkan Lima Sila dalam RUU HIP sebagai peraturan organik, kata dia, maka berakibat Pancasila tidak lagi dapat dijadikan sebagai sumber dari segala sumber hukum negara karena tidak mungkin UUD NKRI Tahun 1945 bersumber dari peraturan di bawahnya (RUU HIP). Dia mengatakan, Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum yang menjiwai dari peraturan perundang-undangan di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## 3. Struktur Tematik

Secara tematik, berita ini memperlihatkan secara keseluruhan pernyataan KH Muhyiddin Junaidi selaku wakil ketua MUI, meminta DPR agar segera mencabut RUU HIP dari program legislasi nasional(prolegnas). Paragraph pertama, penulis menjelaskan bahwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) kembali mengingatkan penarikan pembahasan Rencana Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) setelah sempat ditunda beberapa kali. MUI meminta DPR segera mencabut RUU HIP dari program legislasi nasional(prolegnas). Selanjutnya berita tentang RUU HIP tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Dan di paragraph terakhir penulis menjelaskan bahwa alasan

RUU HIP belum bisa langsung dicabut, meskipun sudah ada RUU Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

#### 4. Struktur Retoris

Pengamatan dari struktur retorik penulis menekankan dengan kata “ingatkan” untuk menyampaikan pernyataan KH Muhyiddin Junaidi yang menggambarkan bahwa DPR mungkin lupa untuk menarik RUU HIP dari program legislasi nasional.

Republik.co.id menuliskan “Dewan Pimpinan (DP) MUI Pusat mengingatkan kembali kepada DPR untuk segera dan wajib menarik RUU HIP dari proses pembahasan dan mencabutnya dari program legislasi nasional (prolegnas),” hal ini ditegaskan melalui kalimat, Muhyiddin mengatakan, penarikan RUU HIP dari pembahasan prolegnas itu sebagaimana surat yang dilayangkan ke Pimpinan DPR RI Nomor: B-1291/DP MUI/VI/2020, tanggal 25 Juni 2020, perihal Penarikan dan Pencabutan RUU HIP. Sehingga jelas jika MUI menolak adanya RUU HIP di Indonesia. Namun kenyataannya bukan hanya RUU HIP belum bisa dicabut namun muncul lagi RUU yang hampir sama yaitu RUU BPIP yang mengatur soal lembaga BPIP yang ada untuk memperkuat bagaimana mensosialisasikan Pancasila yang sudah final.

#### 5. Konsep Psikologi

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menilai RUU HIP tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar hukum Indonesia. RUU HIP ini dianggap dapat merendahkan harkat dan martabat Pancasila itu sendiri. Dengan disesmkannya RUU HIP ini, MUI khawatir jika RUU HIP ini akan mengubah naskah

Pancasila yang sudah hidup di tengah bangsa Indonesia. Pancasila sudah disepakati sebagai konsensus nasional dan sudah menjiwai Piagam Jakarta sehingga sebaiknya tidak lagi diutak-atik demi tatanan Indonesia yang baik seperti saat ini.

## 6. Konsep Sosiologi

MUI Ingatkan DPR Segera Cabut RUU HIP dari Prolegnas merupakan sebuah judul berita yang diterbitkan oleh *Republika Online* pada 26 Agustus 2020. Berita ini diterbitkan di Jakarta. Dengan narasumber Wakil Ketua Umum MUI KH Muhyiddin Junaidi dan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. Berita ini memuat tentang tuntutan MUI kepada DPR RI agar segera mencabut RUU HIP.

Menurut Muhyiddin, MUI berpandangan RUU HIP tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan filosofi bernegara. RUU HIP ingin mengubah naskah Pancasila yang sudah hidup di tengah bangsa Indonesia. Pancasila, kata dia, sudah disepakati sebagai konsensus nasional dan sudah menjiwai Piagam Jakarta sehingga sebaiknya tidak lagi diutak-atik demi tatanan Indonesia yang baik seperti saat ini.

## 7. Kesimpulan Berita

*Republika online* dalam memframing berita tentang Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (HIP) membuat sebuah opini negative. Hal ini ditunjukkan dengan pernyataan Menurut Muhyiddin selaku Wakil Ketua Umum MUI, yang menyatakan bahwa MUI berpandangan RUU HIP tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan filosofi bernegara. RUU HIP ingin mengubah naskah Pancasila yang sudah hidup di tengah bangsa Indonesia. Terlebih dengan pernyataan dan surat yang dikirimkan oleh MUI kepada DPR RI, tentang pencabutan RUU HIP. Hal ini tentunya akan menimbulkan sebuah opini tentang bahayanya RUU HIP apabila tidak segera dicabut di prolegnas, sehingga akan menimbulkan adanya berbagai penolakan yang lebih banyak oleh masyarakat Indonesia.

## BAB V

### A. Kesimpulan

Media Kompas.com dan Republik Onlen merupakan media public yang berperan penting dalam pemberitaan mengenai kejadian dan peristiwa yang terjadi di Indonesia maupun di luar negeri. Hal ini menjadikan setiap peristiwa yang diberitan di media *online* akan dengan mudah tersebar, tak terkecuali berita tentang Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila.

RUU ini di tolak oleh masyarakat karena dinilai mengancam eksistensi Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Jika Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila disahkan, dikhawatirkan Pancasila tidak lagi dapat dijadikan sebagai sumber dari segala sumber hukum negara karena tidak mungkin UUD NKRI Tahun 1945 bersumber dari peraturan di bawahnya (RUU HIP). Hal inilah yang membuat MUI mengirimkan surat agar RUU HIP dapat segera ditarik dari Progeam Legislasi Nasional.

Beritaan ini kemudian dibingkai oleh media Kompas.com dan Republik *Online*, berikut merupakan kesimpulan dari hasil analisis *framing* model Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki :

#### 1. Frame Kompas.com

Pemberitaan kompas.com mengenai RUU HIP, merupakan sebuah upaya membentuk sebuah opini public tentang bagaimana RUU HIP bertentangan dan mengancam eksistensi Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Surat yang di keluarkan DP MUI kepada pimpinan DPR RI perihal pencabutan RUU HIP belum bisa menuai hasil. Palsnya RUU Haluan Ideologi Pancasila tidak bisa serta merta di cabut dalam prolegnas prioritas tahun 2020, karena surat naskah akademi sudah dikirimkan DPR kepada pemerintah.

Dari hasil analisis pbingkaian disimpulkan bahwa media Kompas.com membangun citra yang buruk terhadap Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila. Media Kompas.com menganggap RUU HIP adalah suatu hal yang bertentangan dan mengancam eksistensi Pancasila. Hal tersebut

ditonjolkan dengan kata “berbeda dan mengancam” di judul dan di paragraph pertama. Serta dengan kutipan yang ditulis dalam berita tersebut akan lebih menstimulasi opini public untuk berfikir negative tentang RUU HIP.

## **2. Frame Republik *Online***

Republik *Online* membingkai berita tentang Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila(HIP) sebagai bentuk penolakan terhadap RUU HIP. Hal ini dibuktikan dengan struktur sintaksis pemberitaan, dari judul koran “MUI Ingatkan DPR Segera Cabut RUU HIP dari Prolegnas” diketahi bahwa MUI telah mengingatkan DPR, lewat surat yang dikirim oleh MUI kepada DPR terkait pencabutan RUU HIP dari prolegnas.

Dari hasil analisis *framing* dapat disimpulkan bahwa Republik *Online* membangun citra yang buruk terhadap RUU HIP. Media Republik *Online* menganggap RUU HIP adalah sesuatu yang dapat merendahkan Pancasila sebagai dasar negara. Hal tersebut ditonjolkan dari kata “ingatkan”. Kata ini terdapat di judul “MUI Ingatkan DPR Segera Cabut RUU HIP dari Prolegnas” selain itu kata ini juga muncul di paragraph pertama berita. Serta paragraph yang lain yang berisikan tentang RUU HIP yang tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila.

## **B. Saran**

Untuk para pembaca, hendaknya dapat memahami dan mencermati makna berita yang terdapat dalam media massa. Dengan mencermati kata, istilah, serta isiberita, kita akan dengan mudah mengetahui dan memvalidasi berita-berita yang benar dan berita yang dipalsukan. Terlebih di era digital yang semakin maju ini, media massa bisa dikatakan media pokok bagi setiap generasi untuk mencari informasi mengenai lingkungan sekitarnya.

## **C. Penutup**

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT atas limpahan rahmat dan kasih sayang-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, meskipun masih jauh dari kata sempurna baik dari sisi penulisan, isi penulisan, dalam hal penyajian, atau pun dari sisi yang lain. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat

penulis harapkan sebagai perwujudan pertanggungjawaban penulis terhadap penelitian yang telah dilakukan dan demi kesempurnaan skripsi ini.

Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, baik tenaga maupun ide pikiran dan atas kebaikannya semoga mendapat imbalan dan ridha Allah SWT. Akhirnya penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya. Aamiin



## DAFTAR PUSTAKA

- Asep Syamsul, M.Romli. 2012. *Jurnalistik Online: Panduan Praktis Mengelola Media Online* (Dilengkapi Kiat Blogger, Teknik SEO dan Tips Media Sosial). Bandung: Penerbit Nuansa Cendekia
- Alex Sobur. 2012. *Analisis Teks Media: Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik, dan Analisis Framing*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Alkafi, M. Shandika. *Politik Kekuasaan Dalam Pemberitaan Media Online Analisis Framing Pemberitaan Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi Di Detik.Com*. (Skripsi S1 Program Studi Komunikasi Dan Penyiaran Islam Institute Agama Islam Negeri Purwokerto, 2020)
- Agus Sudibyo. 2001. *Politik Media & Pertarungan Wacana*. Yogyakarta: LKis
- Arifatul Choiri Fauzi. 2007. *Kabar-Kabar Kekerasan Dari Bali*. Yogyakarta: LkiS Pelangi Aksara
- Ahmad Muttaqin. *Ideologi Dan Keberpihakkan Media Massa*. Jurnal Dakwah dan Komunika Vol. 5, No. 2. (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2011).
- Acan Mahdi. *Berita Sebagai Representasi Ideologi Media* (Sebuah Telaah Kritis). Jurnal Al-Hikmah Vol. 9, No. 2. (Pontianak: IAIN Pontianak, 2015).
- Aswad Ishak. 2011. *Mix Methodology dalam Penelitian Komunikasi*, Yogyakarta: Aspikom
- Arikunto, Suharsimi. 2016. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta
- Araliya Aprianti Ode, Canggih. *Kredibilitas Pemberitaan Pada Portal Berita Online Kompas.Com* (Suatu Studi Analisis Isi). Skripsi S1 Fakultas Dakwah Dan Komunikasi. Uin Alauddin Makassar. 2014
- Agung, Eko. *Wacana Moderasi Beragama Di Media Online* (Analisis Wacana Model Van Dijk Di Media Kompas.Com Dan Republika Online). Skripsi S1 Program Studi Komunikasi Dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah. Istitut Agama Islam Negri Purwokerto, 2020.

- Alfiyya Dhiya Haq, Efi Fadilah, *Transformasi Harian Kompas Menjadi Portal Berita Digita Subscription Kompas.Id*, Jurnal Fakultas Ilmu Komunikasi. Volume 01 Nomor 02(Universitas Padjadjaran, 2018)
- Anwar Arifin. 2011. *Dakwah Kontemporer (Sebuah Studi Komunikasi)*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Ardianto, Elvinaro, Lukiati Komala E. 2005. *Komunikasi Massa Suatu Pengantar*, Bandung; Simbiosis Rekatama Media
- Arifin, Anwar. 2011. *Sistem Komunikasi Indonesia*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Ali, Muhammad. 1987. *Strategi Penelitian Pendidikan*. Bandung: Angkasa
- Burhan Bungin. 2007. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana
- Bimo, Nugroho, dkk. 1999. *Politik Media Mengemas Berita*. Jakarta: ISAI
- Biagi, Shirley. 2010. *Media/Impact: Pengantar Media Massa*. Jakarta: salemba Humanika
- Cissel, Margaret. (2012) "*Media Framing: a Comparative Content Analysis on Mainstream and Alternative News Coverage of Occupy Wall Street*", The Elon Journal of Undergraduate Research in Communications, Vol. 3(No. 1), pp. 68
- Citra Hayati Nainggolan. *Analisis Framing Pemberitaan Ganjar Pranowo Dalam Kasus Korupsi E-KTP (Tribun News, Jawa Pos, dan Suara Merdeka Periode Agustus – November 2015 dan Maret 2017)*. Skripsi. (Semarang: Departemen Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Diponegoro, 2017)
- Dede Lilis. 2014. *Media Anak Indonesia Representasi Idola Anak dalam Majalah Anak-Anak*, Jakarta; Pustaka Obor Indonesia
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta; Balai Pustaka.
- Eriyanto. 2002. *Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media*. Yogyakarta: LKiS Yogyakarta
- Eriyanto. 2002. *Anlisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media*. Yogyakarta: LKIS

- Rachmadi. 1990. *Analisis Deskriptif Sistem Pers di Berbagai Negara*. Jakarta: PT. Gramedia
- Cangara, Hafied. 2010. *Pengantar ilmu komunikasi*. Jakarta: Rajawali Pers
- Febriani, Ina Salmah, “*Analisis Deskriptif Manajemen Redaksi pada Republika Online*”, Skripsi, (Fakultas Ilmu Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010)
- Hamad, Ibnu. 2004. *Konstruksi Realitas Politik dalam Medai Massa*. Jakarta: Granit
- Hamad, Ibnu. 2004. *Konstruksi Realitas Politik dalam Medai Massa*. Jakarta : Granit
- Kriyantono, Rachmat. 2009. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: Prenada Media Group
- Lee, Oey Hong. 1965. *Publistik Pers*. Jakarta: Ichtiar
- Lexy J. Moleong. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Lexi J Moeleong. 2009. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Lindawati. *Analisis framing Pemberitaan Label Halal Dalam Undang-Undang Pangan di Republik Online*. (Skripsi S1 Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Ilmu Komunikasi Dan Ilmu Dakwah Syarif Hidayatullah Jakarta, 2013)
- Maghfiro, Laelatul, *Analisis Framing Pemberitaan Kontroversi Film The Santri Di Media Online Voa-Islam.Com Dan Tribunnews.Com* (Skripsi S1 Program Studi Komunikasi Dan Penyiaran Islam Institute Agama Islam Negeri Purwokerto, 2020)
- Mashabi, Sania. *Berita Berjudul MUI: RUU HIP Bertentangan dan Mengancam Eksistensi Pancasila*, kompas.com yang di akses pada 7 oktober 2020
- Masduki. 2005. *Kebebasan Pers dan Kode Etik Jurnalistik*. UII Press : Yogyakarta
- Muridan, dkk. *Wacana Agama Anti Terorisme Di Media Online: Penelitian Kolektif*. (Purwokerto: Stain Purwokerto, 2013)

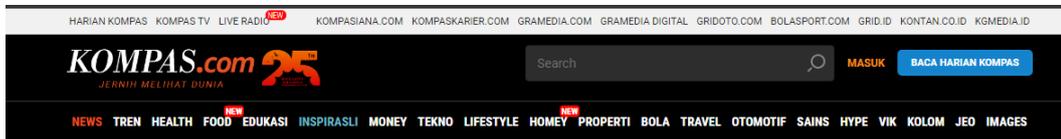
- Mahpuddin. *Ideologi Media Massa dan Pengembangan Civil Society*. Jurnal *Academica* Vol. 1, No. 2. (Palu: Jurnal Academica Universitas Tadulako, 2009)
- Nasution, Zulkarimein. 2015. *Etika Jurnalisme Prinsip-prinsip Dasar*, Jakarta: Cet 1 Rajawali Pers
- Nurudin. 2005. *Sistem Komunikasi Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers
- Patria, Nezar, Arief, dkk. 1999. *Negara dan Hegemoni*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Prabowo, Haris. *Berita Siapa penggerak RUU HIP yang ditentang banyak pihak? Kenapa pula itu tak penting?* Di *tirto.id*, di akses pada tanggal 24 november 2020
- “Perkembangan Media *Online* di Indonesia” *kompasiana.com*, 7 Januari 2016
- Pawito. 2015. *Komunikasi Politik: Media Massa dan Kampanye Pemilihan*, (Yogyakarta dan Bandung: Jalasutra
- Profil Kompas <https://inside.kompas.com> di akses pada 7 oktober 2020
- Profil Republika <https://www.republika.co.id> diakses pada 7 oktober 2020
- Ridlo, Muhammad ‘Eisy. 2007. *Peranan Media Dalam Masyarakat, Kemerdekaan Pers Fondasi Penegakan Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Dewan Pers
- Soyomukti, Nurani. 2012. *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media
- Supranto. 2000. *Statistik Teori dan Aplikasi*, Jilid 1, Edisi Keenam. Jakarta: Erlangga
- Suhadang, Kustadi. 2004. *Pengantar Jurnalistik*. Bandung: Nuansa
- Soejono, Abdurrahman. 1990. *Metode Penelitian Suatu pemikiran dan Penerapan* Jakarta: PT Rineka Cipta
- Syamsudin, M dkk. 2009. *Pendidikan Pancasila Menetapkan Pancasila dalam Konteks Keislaman dan Keindonesiaan*. Yogyakarta: Total Media
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabet
- Sugiyono. 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta
- Syafriadi. 2018. *Hukum Pers dalam Ketatanegaraan Indonesia*. Yogyakarta: Suluh Media

- Urfan Pratama, Muhammad. *Analisis Semiotika Pemaknaan Logo Baru Pt Gramedia Asri Media* (Gramedia). Skripsi S1 Program Studi Ilmu Komunikasi. Jakarta. 2017
- Wahid, Umaimah. 2018. *Komunikasi Politik: Teori, Konsep, dan aplikasi pada Era Media Baru*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media
- Wulandari, Nur Aisyah. *Analisis framing terhadap foto prewedding pada detik.com dan kompas.com*. (Skripsi S1 Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Komunikasi Dan Ilmu Dakwah Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014)
- Zen, Fathurin. 2004. *NU Politik: analisis wacana media*. Yogyakarta: LKis
- Zein, Fadhilah. 2013. *Kezaliman Media Massa Terhadap Umat Islam*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar



# Lampiran-Lampiran

## Gambar 5 Berita Kompas.co.id Edisi Agustus 2020



Home / News / Nasional

### Budiman Sudjatmiko Sebut PDI-P Bukan Konseptor RUU HIP

Kompas.com - 17/08/2020, 22:09 WIB

BAGIKAN:  

[Komentar](#)



KOMPAS.com/Devi Mega Purnamasari/Politisi PDI-P Budiman Sudjatmiko saat ditemui di kawasan Karet, Jakarta Pusat, Jumat (7/2/2020).

Penulis: [Devi Mega Purnamasari](#) | Editor: [Bayu Galih](#)

**JAKARTA, KOMPAS.com** - Politisi **PDI-P** Budiman Sudjatmiko mengatakan, partainya bukan merupakan konseptor dari Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila ( **RUU HIP** ) yang menuai kontroversi di masyarakat.

Budiman mengatakan, pihaknya justru mengusulkan tentang pedoman pelaksanaan sosialisasi Pancasila, dan bukan mengacu pada esensinya.

"RUU HIP usulan DPR. Sebenarnya yang kami usulkan adalah tentang pedoman pelaksanaan sosialisasi Pancasila bukan mengacu pada esensinya," ujar Budiman dikutip dari acara "Aiman Spesial Kemerdekaan" di Kompas TV, Senin (17/8/2020) malam.

**Baca juga:** [Menurut Baleg, RUU HIP Bisa Dicabut dari Prolegnas Prioritas Melalui Bamus](#)

Budiman mengatakan, Pancasila yang dibicarakan partainya adalah terkait pidato-pidato kelahiran Pancasila atau proses sidang badan penyelidik usaha-usah persiapan kemerdekaan (BPUPIK).

Pancasila yang disepakati pihaknya, kata dia, merupakan Pancasila yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945.

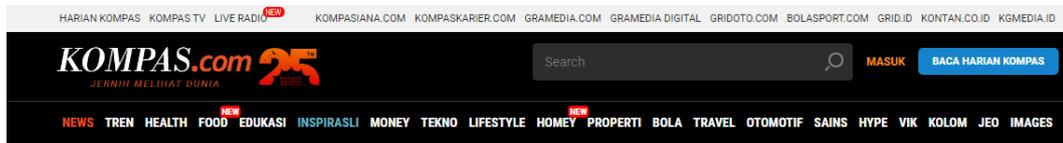
Namun justru, menurut dia, ada usulan dari partai lain agar pembahasan Pancasila tidak hanya berbicara soal sosialisasi semata.

"Cuma ada satu usulan kami di PDI-P yang sepakat tak disampaikan. Ada usulan partai lain, mengapa hanya bicara soal pengorganisasian dan sosialisasi Pancasila? Mengapa tidak meluaskannya menjadi soal-soal yang lebih substantif berkaitan dengan Pancasila itu sendiri," kata dia.

#### TERPOPULER

1	22 Perwira Tinggi TNI Naik Pangkat, Berikut Daftar Namanya Dibaca 80.010 kali
2	UPDATE: Tambah 13.094, Kasus Covid-19 Indonesia Lewati 1 Juta Orang Dibaca 36.248 kali
3	Dilantik Jokowi, Listyo Sigit Prabowo Resmi Jadi Kapolri Dibaca 29.910 kali
4	Jadi Tersangka Dugaan Rasialisme, Ambroncius Nababan Dijemput Paksa Polisi Dibaca 24.774 kali

## Gambar 6 Berita Kompas.co.id Edisi Agustus 2020



Home / News / Nasional

### Fahri Hamzah Nilai RUU HIP Akan Digugat jika Tetap Disahkan, Ini Alasannya

Kompas.com - 18/08/2020, 08:32 WIB

BAGIKAN:  

[Komentar](#)



KOMPAS.com/HaryantipuspariniInisiator Partai Gelora Fahri Hamzah di di Hotel Regis Arion, Jakarta Selatan, Sabtu (9/11/2019).

Penulis: [Deti Mega Pumamasari](#) | Editor: [Diamanty Meiliana](#)

**JAKARTA, KOMPAS.com** - Wakil Ketua Umum Partai Gelora [Fahri Hamzah](#) menilai, rancangan undang-undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP) akan digugat jika disahkan karena memiliki nilai yang salah.

Ia mengatakan, ketika amandemen undang-undang dasar (UUD) 1945 dilakukan hingga empat kali, Pembukaan UUD 1945 tetap dikunci agar tidak ada perubahan karena Pancasila termaktub dalam pembukaan tersebut.

Perubahan UUD itu pun, kata dia, relatif diterima oleh semua kalangan karena di masa sebelumnya dinilai jelas ada penyelewengan menggunakan teks-teks sensitif seperti itu.

Antara lain soal kewenangan Presiden hingga jangka waktu kekuasaan Presiden yang tidak terbatas sehingga saat itu dilakukan diskusi dan diubah.

**Baca juga:** [Fahri Hamzah Sebut di Era Jokowi Muncul Klaim Sepihak soal Pancasila](#)

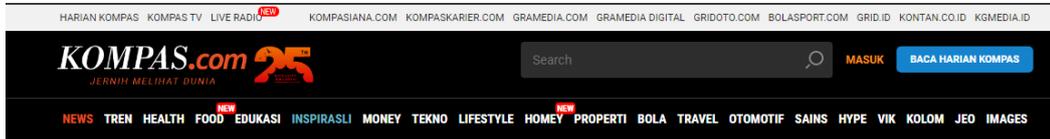
"Tapi setelah amandemen konstitusi dilakukan empat kali, Pancasila dipastikan tidak ada perubahan karena untuk amandemen konstitusi saja, pembukaannya kami tidak mau amandemen karena ada teks Pancasila di dalamnya," ujar Fahri dalam acara "Aiman Spesial Kemerdekaan " di Kompas TV, Senin (17/8/2020) malam.

Hal itu pula, kata dia, yang membuat Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) saat itu memperkenalkan empat pilar yang sedianya sudah berjalan dan sedianya tetap terus disosialisasikan kepada masyarakat.

#### TERPOPULER

1	22 Perwira Tinggi TNI Naik Pangkat, Berikut Daftar Namanya <small>Dibaca 80.010 kali</small>
2	UPDATE: Tambah 13.094, Kasus Covid-19 Indonesia Lewati 1 Juta Orang <small>Dibaca 36.248 kali</small>
3	Dilantik Jokowi, Listyo Sigit Prabowo Resmi Jadi Kapolri <small>Dibaca 29.910 kali</small>
4	Jadi Tersangka Dugaan Rasialisme, Ambroncius

## Gambar 7 Berita Kompas.co.id Edisi Agustus 2020



Home / News / Nasional

### Sekjen MUI: Yang Harus Dilakukan Pemerintah Bukan Bahas RUU Cipta Kerja atau HIP

Kompas.com - 19/08/2020, 08:29 WIB

BAGIKAN:  

[Komentar](#)



KOMPAS.com/Kristian ErdiantoSekjen MUI Anwar Abbas saat hadir dalam rapat pleno Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia di gedung MUI, Jakarta Pusat, Rabu (26/4/2017).

Penulis: [Fitria Chusna Farisa](#) | Editor: [Diamanty Meiliana](#)

**JAKARTA, KOMPAS.com** - Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas menyebut, urgensi pemerintah saat ini bukanlah menyusun atau membahas rancangan undang-undang (RUU) yang tak ada kaitannya dengan pandemi Covid-19.

Pemerintah, kata Anwar, seharusnya fokus untuk mencari solusi atas persoalan ekonomi yang ditimbulkan akibat pandemi.

Melihat permasalahan yang muncul belakangan, diperkirakan ekonomi Indonesia belum berubah menjadi mengembirakan beberapa bulan ke depan.

"Yang sangat perlu dilakukan oleh pemerintah saat ini bukan membuat dan atau mengajukan RUU baru seperti RUU HIP (Haluan Ideologi Pancasila) atau RUU BPIP (Badan Pembinaan Ideologi Pancasila) dan RIU Cipta Kerja atau RUU Omnibuslaw," kata Anwar melalui keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Rabu (19/8/2020).

**Baca juga:** [Sekjen MUI Ingatkan DPR Bikin Undang-undang Sesuai Pancasila dan UUD 1945](#)

Menurut Anwar, meskipun pemerintah sudah membentuk tim untuk menangani persoalan akibat pandemi, tapi jumlah pasien baru Covid-19 belum berhasil diturunkan.

Angka PHK pun masih tinggi sehingga pengangguran meningkat. Dengan begitu, dikhawatirkan pendapatan masyarakat secara agregat akan menurun sedangkan kemiskinan akan naik.

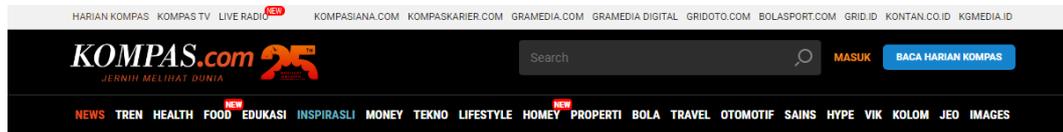
Bila angka pengangguran dan kemiskinan melonjak, negara akan terseret ke dalam krisis baru yakni krisis sosial. Sehingga pencurian, pembegalan, perampokan dan berbagai bentuk tindak kriminal lainnya bakal banyak terjadi.



#### TERPOPULER

1	22 Perwira Tinggi TNI Naik Pangkat, Berikut Daftar Namanya Dibaca 80.010 kali
2	UPDATE: Tambah 13.094, Kasus Covid-19 Indonesia Lewati 1 Juta Orang Dibaca 36.248 kali
3	Dilantik Jokowi, Listyo Sigit Prabowo Resmi Jadi Kapolri Dibaca 29.910 kali
4	Jadi Tersangka Dugaan Rasialisme, Ambroncius Nababan Dijemput Paksa Polisi Dibaca 24.774 kali
5	Jadi Tersangka Rasialisme terhadap Natalius Piqai. Siapa

## Gambar 8 Berita Kompas.co.id Edisi Agustus 2020



Home / News / Nasional

### MUI: RUU HIP Bertentangan dan Mengancam Eksistensi Pancasila

Kompas.com - 26/08/2020, 13:30 WIB

BAGIKAN:  

[Komentar](#)



Kristian Erdianto Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sholahuddin Al-Aiyub, Sekretaris Jenderal MUI Anwar Abbas, Wakil Ketua Umum MUI Zainut Tauhid Saadi, saat memberikan keterangan pers di gedung MUI, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (22/11/2016).

Penulis: [Sania Mashabi](#) | Editor: [Kristian Erdianto](#)

**JAKARTA, KOMPAS.com** - Majelis Ulama Indonesia (MUI) menilai Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) bertentangan dan mengancam eksistensi Pancasila.

Pernyataan ini disampaikan oleh Sekretaris Jenderal MUI [Anwar Abbas](#) melalui keterangan tertulisnya, Rabu (26/8/2020).

IA

"RUU HIP sangat bertentangan dan mengancam eksistensi Pancasila sehingga menimbulkan reaksi dan penolakan dari masyarakat luas," kata Anwar.

**Baca juga:** [Fahri Hamzah Nilai RUU HIP Akan Digugat jika Tetap Disahkan, Ini Alasannya](#)

Oleh karena itu, Anwar berharap DPR segera menarik RUU tersebut dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2020.

Permintaan pencabutan tersebut sesuai dengan surat DP MUI Pusat kepada Pimpinan DPR RI Nomor: B-1291/DP MUI/VI/2020, tanggal 25 Juni 2020, perihal Penarikan dan Pencabutan RUU HIP.

"Kepada DPR untuk segera dan wajib menarik RUU HIP dari proses pembahasan dan mencabutnya dari Prolegnas," ujar dia.

**Baca juga:** [Menurut Baleg, RUU HIP Bisa Dicabut dari Prolegnas Prioritas Melalui Bamus](#)

Diberitakan sebelumnya, Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Supratman Andi Agtas mengatakan, DPR memiliki mekanisme dalam penarikan RUU dari Prolegnas prioritas 2020.

#### TERPOPULER

1	22 Perwira Tinggi TNI Naik Pangkat, Berikut Daftar Namanya Dibaca 80.010 kali
2	UPDATE: Tambah 13.094, Kasus Covid-19 Indonesia Lewati 1 Juta Orang Dibaca 36.248 kali
3	Dilantik Jokowi, Listyo Sigit Prabowo Resmi Jadi Kapolri Dibaca 29.910 kali
4	Jadi Tersangka Dugaan Rasialisme, Ambroncius Nababan Dijemput Paksa Polisi Dibaca 24.774 kali
5	Jadi Tersangka Rasialisme terhadap Natalius Pirai, Siapa

## Gambar 9 Berita Republika Edisi Agustus 2020

Home > News > Nasional

### MUI Ingatkan DPR Segera Cabut RUU HIP dari Prolegnas

Rabu 26 Aug 2020 13:27 WIB

Red: Andri Saubani



Wakil Ketua Umum MUI KH Muhyiddin Junaidi didampingi pimpinan MUI saat memimpin pertemuan dengan pimpinan ormas Islam tingkat pusat di Gedung MUI Pusat, Jakarta, Kamis (12/8).

Foto: Republika/Prayogi

#### MUI berpandangan RUU HIP tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Majelis Ulama Indonesia (MUI) kembali mengingatkan penarikan pembahasan Rencana Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) setelah sempat ditunda beberapa kali. MUI meminta DPR segera mencabut RUU HIP dari program legislasi nasional (prolegnas).

"Dewan Pimpinan (DP) MUI Pusat mengingatkan kembali kepada DPR untuk segera dan wajib menarik RUU HIP dari proses pembahasan dan mencabutnya dari program legislasi nasional (prolegnas)," kata Wakil Ketua Umum MUI KH Muhyiddin Junaidi, MA kepada wartawan di Jakarta, Rabu (26/8).

Muhyiddin mengatakan, penarikan RUU HIP dari pembahasan prolegnas itu sebagaimana surat yang dilayangkan ke Pimpinan DPR RI Nomor: B-1291/DP MUI/VI/2020, tanggal 25 Juni 2020, perihal Penarikan dan Pencabutan RUU HIP.

Menurut Muhyiddin, MUI berpandangan RUU HIP tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan filosofi bernegara. RUU HIP ingin mengubah naskah Pancasila yang sudah hidup di tengah bangsa Indonesia.

Pancasila, kata dia, sudah disepakati sebagai konsensus nasional dan sudah menjiwai Piagam Jakarta sehingga sebaiknya tidak lagi diutak-atik demi tatanan Indonesia yang baik seperti saat ini.

"MUI berkeyakinan bahwa menempatkan/mendudukan Pancasila dalam peraturan organik (*instrumental norm*) sebagaimana dirumuskan dalam RUU HIP sejatinya merendahkan harkat dan martabat Pancasila itu sendiri dan mengkerdilkan nilai-nilai Pancasila sebagai falsafah bangsa dan negara ke dalam norma yang *rigid* dan sempit," katanya.

Mari ulurkan tangan untuk mengabdikan saudara kita yang tertinggal masalah di Indonesia timur, Kalimantan Selatan, dan daerah-daerah lainnya. Mereka harus dipikirkan untuk bisa terus tegar menghadapi ujian. Kepedulian kita sangatlah penting. Ayo kita bantu sesama anak bangsa untuk bangkit dan penuh kemudi dalam menata kehidupan.

## BANTU SESAMA

BERIKAN DONASI

PT Republika Media Mandiri

BCA 375.305.177-1 mandiri 127.00.9090909-2

republicaonline@gmail.com @republicaonline republicaonline

Jadwal Shalat Tuesday, 26 Jan 2021 20:55:48

JAKARTA

republica.co.id

## SUBUH

04:15

EMBED <iframe src="https://www.republica.co.id">

Dunia Tri. Kekuatarku.

### Puas internetan dengan Perdana Tri. Nikmati Welcome Kuota 6GB.

Klik di sini

# RTO

## Gambar 10 Berita Republika Edisi Agustus 2020



Home > News > Nasional

### MUI: RUU HIP Makin Lama Digantung Makin Timbulkan Kegaduhan

Selasa 25 Aug 2020 18:12 WIB

Red: Bayu Hermawan



Muhyiddin Junaidi

Foto: Republika TV/Ravid Al Vidi



**Waketum MUI mempertanyakan kejelasan nasib RUU HIP.**

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Muhyidin Junaidi menegaskan kembali penolakannya terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Haluan Ideologi Pancasila (HIP). Dia juga meminta DPR untuk segera mencabut RUU tersebut dari program legislasi nasional (prolegnas).

"MUI tetap menolak keras **RUU HIP** dan meminta agar DPR segera mencabut serta membatalkannya dari prolegnas. Semakin lama digantung, maka semakin menimbulkan kegaduhan dan ketidakpastian hukum," katanya kepada *Republika.co.id* dalam keterangan tertulis, Selasa (25/8).

Bahkan, menurut Muhyidin, justru bisa menimbulkan pro kontra di kalangan masyarakat sehingga polarisasi pun bisa menjadi tidak terhindarkan. Jika ini terjadi, lanjut dia, maka akan merusak *ukhuwah Islamiyah*.

Selain itu, Muhyidin juga menyadari ada RUU yang hendak diajukan setelah RUU HIP ditolak, yaitu RUU Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP). RUU ini adalah sebagai payung hukum Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Dia menegaskan penolakannya terhadap RUU BPIP yang diajukan pemerintah karena melanggar aturan, prosedur dan cacat hukum.

TO